

# **LAPORAN KEUANGAN**

## **SKPD**

### **TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA**

- ❖ **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- ❖ **LAPORAN OPERASIONAL**
- ❖ **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- ❖ **NERACA**
- ❖ **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)**

**( UN AUDITED )**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2025 .....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2025.....	viii
NERACA DAERAH PER 31 DESEMBER 2025 .....	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>6</b>
1.1. Ekonomi Makro .....	6
1.2. Kebijakan Keuangan.....	10
II.1.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan.....	10
II.1.2 Kebijakan Anggaran Belanja.....	11
II.1.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan.....	11
1.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	11
<b>BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengelolaan Pendapatan .....	12
2.2. Pengelolaan Belanja.....	12
III.2.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2025 .....	12
2.3. Pengelolaan Pembiayaan .....	13
III.3.1 Penerimaan Pembiayaan.....	13
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>14</b>
3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan .....	14
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
IV.3.1 Pengukuran Aset.....	16
IV.3.2 Pengukuran Kewajiban.....	19
IV.3.3 Pengukuran Ekuitas .....	20
IV.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA.....	20
IV.3.5 Pengukuran Belanja.....	20
IV.3.6 Pengukuran Pendapatan LO .....	21
IV.3.7 Pengukuran Beban.....	22

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	24
4.1.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	24
V.3.1	Pendapatan.....	24
V.3.2	Belanja.....	24
V.3.3	Transfer.....	27
V.3.4	Pembiayaan.....	27
4.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca.....	28
V.1.1	Aset.....	28
V.1.2	Kewajiban.....	61
V.1.3	Ekuitas.....	62
4.3.	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	62
V.2.1	Pendapatan.....	63
V.2.2	Kegiatan Non Operasional.....	79
V.2.3	Pos Luar Biasa.....	80
V.2.4	Surplus/Defisit-LO.....	80
4.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	80
V.3.1	Ekuitas Awal.....	80
V.3.2	Surplus / Defisit LO.....	80
V.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	81
V.3.4	Akun Untuk Dikonsolidasikan.....	82
V.3.5	Ekuitas Akhir.....	82
BAB VI	INFORMASI NON KEUANGAN.....	83
5.1.	Organisasi dan Tata Kerja OPD.....	83
VI.3.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.....	83
VI.3.2	Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	85
5.2.	Rencana Strategis OPD.....	89
VI.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	89
VI.1.2	Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	90
5.3.	Informasi Non Keuangan Lainnya.....	92
VI.2.1	Program dan Kegiatan.....	92
VI.2.2	Prestasi atau Penghargaan.....	97
BAB VII	PENUTUP.....	98
LAMPIRAN	.....	99

**PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB**

**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN UNTUK  
TAHUN YANG  
BERAKHIR S/D 31  
DESEMBER 2025 DAN 31  
DESEMBER 2024**

**LAPORAN**  
**OPERASIONAL UNTUK**  
**PERIODE YANG**  
**BERAKHIR S/D 31**  
**DESEMBER 2025**

**LAPORAN PERUBAHAN  
EKUITAS UNTUK  
PERIODE YANG  
BERAKHIR S/D 31  
DESEMBER 2025**

**NERACA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2025**

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah,
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah,
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



## 1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2020;
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2025 tentang Bagan Akun Standar;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2025.



### **1.3.Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**

- BAB I PENDAHULUAN**
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
    - 2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan
    - 2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
    - 2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**
  - 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
    - 3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
    - 3.1.2. Permasalahan yang Dihadapi
  - 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
    - 3.2.1. Target dan Realisasi Belanja Daerah
    - 3.2.2. Permasalahan yang Dihadapi
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
    - 4.3.1 Pengukuran Aset
    - 4.3.2 Pengukuran Kewajiban
    - 4.3.3 Pengukuran Ekuitas
    - 4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA
    - 4.3.5 Pengukuran Belanja
    - 4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO
    - 4.3.7 Pengukuran Beban
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
  - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1. Pendapatan
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Pembiayaan



5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1. Kegiatan Operasional

5.3.2. Kegiatan Non Operasional

5.3.3. Pos Luar Biasa

5.3.4. Surplus/Defisit LO

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal

5.4.2. Surplus/Defisit-LO

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.4.4. Ekuitas Akhir

**BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 Organisasi dan Tata Kerja OPD Tahun 2025

6.2 Rencana Strategis OPD

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

**BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 1.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Memperhatikan perkembangan ekonomi makro nasional yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Kondisi ini ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan permintaan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi.

#### EKONOMI INDONESIA TRIWULAN 3-2025 TUMBUH 5,04%



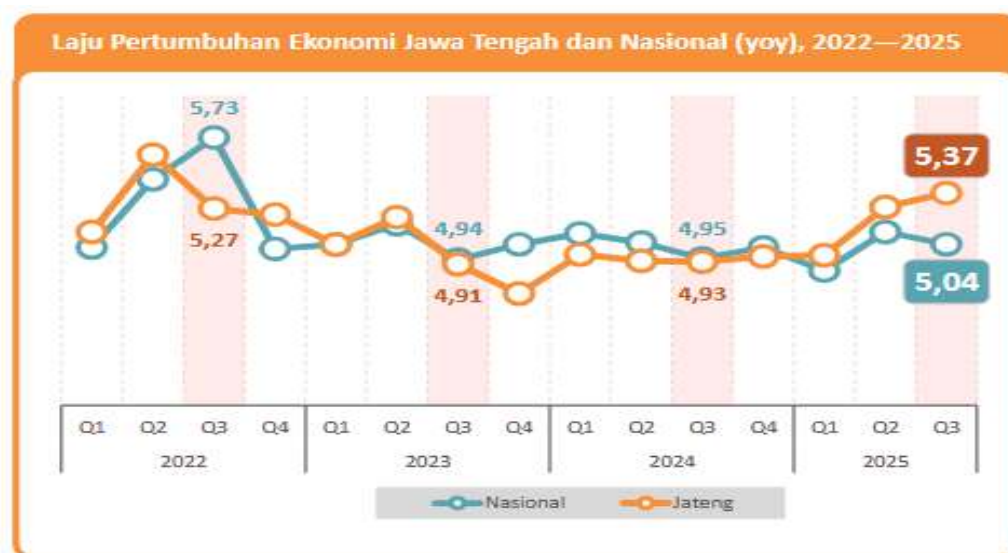
(Berita Resmi Statistik, BPS, No. 102/11/Th. XXVIII, 5 November 2025)

Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan 3-2025 (y-on-y). Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan, Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi:

- Jasa Pendidikan didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan.
- Jasa Perusahaan didorong oleh peningkatan pendapatan jasa persewaan peralatan dan jasa profesional .
- Jasa Lainnya ditopang oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara.

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan di seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih berlanjut, dengan didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha.

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37 persen secara tahunan (year on year/y-on-y) (*Berita Resmi Statistik, BPS Jawa Tengah, No. 67/11/33/Th. XIX, 5 November 2025*).



Capaian itu tak lepas dari berbagai program yang digulirkan oleh Pemprov Jateng, termasuk upaya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja ekonomi provinsi yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih terjaga positif dengan kontribusi besar dari industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan aktivitas industri terus bergerak.

Strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di antaranya :

- Mengedepankan collaborative government (pemerintahan kolaboratif). Adanya salah satu kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, diperlukan perencanaan dan kerja kolaborasi dari seluruh stakeholder, termasuk dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.



- Terus berupaya menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
- memfasilitasi peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, serta mengupayakan *link and match* dunia pendidikan dengan industri.
- mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Bahkan, seluruh kepala daerah di Jateng didorong untuk membuka kawasan industri atau ekonomi baru untuk meningkatkan investasi di wilayahnya masing-masing.

Dengan melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kota Salatiga optimis dapat mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi terus dilakukan pada tahun 2025 yang didukung oleh kegiatan-kegiatan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2025 ini, antara lain : (RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026)

- Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
- Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi
- Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
- Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi



- Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
- Menyelenggarakan dan mengikuti pameran
- Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
- Menyelenggarakan pelatihan IKM
- Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
- Melaksanakan survey dan pengawasan industri
- Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan
- Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja
- Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
- Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah
- Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)
- Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang
- Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Pasar tradisional
- Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL
- Meningkatkan legalitas perizinan pelaku usaha perdagangan VI - 34 RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026
- Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf pariwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi
- Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
- Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung



- Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)
- Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong
- Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

## 1.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2025.

### II.1.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah sebagai unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik. Namun, dengan mengingat Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perangkat daerah ini bukan merupakan unit penghasil sehingga tidak memiliki anggaran pendapatan.



### **II.1.2 Kebijakan Anggaran Belanja**

Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap bidang harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

### **II.1.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian, sampai dengan tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki anggaran pembiayaan.

### **1.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.855.187.678,00 direalisasikan Rp10.848.380.252 (91,51%). Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi, dengan total anggaran sebesar Rp11.487.500.978,00 dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp10.486.076.287,00 (91,28%).
- b. Belanja Modal, dengan total anggaran sebesar Rp367.686.700,00 dan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp362.303.965,00 (98,54 %).



### BAB III

## IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

### 2.1. Pengelolaan Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga bukan SKPD Penghasil, sehingga tidak ada pendapatan.

### 2.2. Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

#### III.2.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2025

##### Belanja Daerah

Target	: Rp11.855.187.678,00
Realisasi	: Rp10.848.380.252,00
Prosentase	: 91,51%

##### a. Belanja Operasi

Target	: Rp11.487.500.978,00
Realisasi	: Rp10.486.076.287,00
Prosentase	: 91,28%

Terdiri dari :

##### 1) Belanja Pegawai

Target	: Rp5.320.945.769,00
Realisasi	: Rp4.844.814.323,00
Prosentase	: 91,05%

##### 2) Belanja Barang dan Jasa

Target	: Rp6.166.555.209,00
Realisasi	: Rp5.641.261.964,00
Prosentase	: 91,48%

##### b. Belanja Modal

Target	: Rp367.686.700,00
Realisasi	: Rp362.303.965,00
Prosentase	: 98,54%



### **3.2.2. Permasalahan yang dihadapi Dalam Pengembangan Keuangan**

-

### **2.3. Pengelolaan Pembiayaan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga tidak ada pembiayaan.

#### **III.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga bukan merupakan SKPD penghasil, sehingga tidak ada penerimaan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka salah satu yang ditetapkan menjadi Entitas Akuntansi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

#### **3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah Basis Akrua, sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2025 tentang Bagan Akun Standar;

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrua, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui :



- a. Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Pada saat diterima oleh SKPD; atau
- c. Pada saat diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada entitas pelaporan.

### **3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. **PENDAPATAN**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. **BELANJA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

- c. **ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber



- sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, dan asset non lancar.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu atau saat ini yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

e. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

#### IV.3.1 Pengukuran Aset

- a. Kas dan setara kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal; kas dan setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek.
- c. Beban dibayar di muka (prepaid expenses) secara tunai dan dicatat sebagai asset sebelum digunakan atau dikonsumsi.
- d. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- e. Persediaan dicatat sebesar :
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Atas persediaan Kota Salatiga, terdapat dua jenis belanja/biaya yang dapat diatribusikan pada harga perolehan persediaan, yaitu :

- 1) Pajak pertambahan nilai



Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang harus dibayarkan atas pembelian barang yang dilakukan oleh Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap unit barang yang diperoleh. Pajak Pertambahan Nilai dapat termasuk (included) maupun di luar (excluded) harga beli barang. Apabila harga beli barang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus diakui sebagai tambahan harga perolehan barang.

2) Biaya pengiriman

Biaya pengiriman adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Kota Salatiga atas pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara penyedia barang dan Kota Salatiga. Atas biaya pengiriman, proses atribusi dapat terjadi dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Apabila biaya pengiriman terjadi atas satu jenis barang, maka biaya pengiriman tersebut diatribusikan secara penuh pada barang yang diperoleh.
- b. Apabila biaya pengiriman terjadi atas lebih dari satu jenis barang, maka atribusi biaya pengiriman dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut:
  - 1) Penentuan proporsi nilai barang berdasarkan hasil pembagian antara nilai masing-masing barang dengan total nilai barang.
  - 2) Atribusi biaya pengiriman ke masing-masing barang berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang (langkah 1) dengan total biaya pengiriman.

Proses atribusi dengan berbagai variasi jenis biaya yang dapat diatribusikan pada persediaan Kota Salatiga, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

1. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas perolehan satu jenis barang dalam satu paket pengadaan diatribusikan secara penuh pada jenis barang yang diperoleh,
2. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas perolehan lebih dari satu jenis barang dalam satu paket pengadaan, proses atribusi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Penentuan proporsi nilai barang
  - b. Atribusi komponen biaya ke masing-masing barang.  
Atribusi komponen biaya ke masing-masing barang berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang dengan total komponen biaya
  - c. Penentuan Biaya Perolehan Barang.



Penentuan biaya perolehan barang dilakukan dengan menjumlahkan nilai beli masing-masing barang dan nilai atribusi komponen biaya untuk masing-masing barang

3. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas lebih dari satu jenis paket pengadaan dan lebih dari satu jenis barang.

Proses atribusi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan proporsi paket pengadaan

Proporsi paket pengadaan ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah nilai masing-masing paket pengadaan terhadap total nilai keseluruhan paket pengadaan.

- b. Penentuan proporsi atribusi masing-masing barang dalam setiap paket pengadaan.

Proporsi atribusi atas masing-masing barang pada setiap paket pengadaan ditentukan berdasarkan hasil pembagian antara nilai barang terhadap total nilai barang pada setiap paket pengadaan.

- f. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal Entitas Pelaporan, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.
- g. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat peroleh tidak diterapkan pada proses penilaian kembali (revaluasi). Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan & pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- 1) Tanah diakui pada saat perolehan, dinilai sebesar biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 2) Peralatan dan Mesin diukur sebesar biaya perolehan yang menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya kepanitiaan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 3) Gedung dan Bangunan diukur sebesar biaya perolehan gedung dan bangunan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan diukur sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya perolehan meliputi semua biaya untuk memperoleh atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- 5) Aset Tetap Lainnya diukur sebesar biaya perolehan aset tetap lainnya yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain : Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### **IV.3.2 Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



### IV.3.3 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
- d. Ekuitas akhir

### IV.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pendapatan-LRA diakui :
  - 1) Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
  - 2) Pada saat diterima oleh OPD ; atau
  - 3) Pada saat diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan asas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.

### IV.3.5 Pengukuran Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah..
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- d. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas pelaporan pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut



disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD/ Kuasa BUD).

- e. Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

- f. Belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberian bantuan social dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan social sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.
- i. Belanja bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- j. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **IV.3.6 Pengukuran Pendapatan LO**

Pengukuran adalah penetapan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Berdasarkan pengertian diatas, pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Angka tersebut yang sudah ditentukan, belum tentu dijumlah dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pengukuran pendapatan LO:

- a. Pendapatan LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat



pendapatan dengan nilai netonya. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat :
  - 1) Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

#### **IV.3.7 Pengukuran Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat :
  - 1) Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
  - 2) Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
    - a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
    - b) konsumsi barang/jasa non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
  - 4) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

---

c. Beban dicatat sebesar :

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- 2) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.



**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Berikut diuraikan penjelasan mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 :

**V.3.1 Pendapatan**

**Rp0,00**

DP3APPKB bukan SKPD Penghasil, sehingga tidak ada pendapatan.

No	Uraian	2025			2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**V.3.2 Belanja**

**Rp10.848.380.252,00**

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2025 sebesar Rp10.848.380.252,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ratus lima puluh dua rupiah*) atau sebesar 91,51% dari total anggaran di tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	2025			2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	11.487.500.978,00	10.486.076.287,00	91,28	12.621.071.353,00	10.870.342.025,00
2	Belanja Modal	367.686.700,00	362.303.965,00	98,54	945.299.750,00	920.506.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.855.187.678,00</b>	<b>10.848.380.252,00</b>	<b>91,51</b>	<b>13.566.371.103,00</b>	<b>11.790.848.025,00</b>

**V.3.2.1 Belanja Operasi**

**Rp10.486.076.287,00**

Total realisasi belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp10.486.076.287,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	2025			2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.320.945.769,00	4.844.814.323,00	91,05	5.314.497.624,00	4.724.633.491,00
2	Belanja Barang & Jasa	6.166.555.209,00	5.641.261.964,00	91,48	7.306.573.729,00	6.145.708.534,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.487.500.978,00</b>	<b>10.486.076.287,00</b>	<b>91,28</b>	<b>12.621.071.353,00</b>	<b>10.870.342.025,00</b>

**V.3.2.1.1 Belanja Pegawai****Rp4.844.814.323,00**

Belanja pegawai sebesar Rp4.844.814.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	2025		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Gaji dan Tunjangan	2.831.445.769,00	2.515.922.385,00	2.811.705.424,00	2.469.009.776,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	2.489.500.000,00	2.328.891.938,00	2.474.345.400,00	2.235.463.715,00
3.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	24.328.800,00	20.160.000,00
4.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	4.118.800,00	0,00
<b>Total Belanja Pegawai</b>		<b>5.320.945.769,00</b>	<b>4.844.814.323,00</b>	<b>5.314.497.624,00</b>	<b>4.724.633.491,00</b>

**V.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa****Rp5.641.261.964,00**

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp5.641.261.964,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	2025		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.974.302,00	1.850.349.544,00	2.744.207.442,00	2.008.511.511,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.386.223.541,00	1.243.440.551,00	1.595.739.733,00	1.377.284.599,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	77.260.366,00	75.303.543,00	59.252.800,00	58.052.701,00
4	Belanja Sewa Peralatan & Mesin	68.000.000,00	57.286.000,00	122.722.500,00	109.186.500,00
5	Belanja Sewa Gedung & Bangunan	68.525.000,00	51.025.000,00	35.975.000,00	17.575.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	46.935.000,00	45.285.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.250.000,00	29.136.800,00	83.353.420,00	80.443.170,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	74.736.350,00	80.000.000,00	78.088.500,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	66.600.000,00	61.676.188,00	62.900.470,00	61.115.434,00
10	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	38.804.000,00	37.911.032,00	0,00	0,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.627.963.000,00	1.509.866.960,00	2.051.892.364,00	1.917.521.119,00
12	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masy	643.020.000,00	605.224.996,00	442.650.000,00	410.050.000,00
13	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ Pihak Lain/ Masy	-	-	-	-
<b>Total Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>6.166.555.209,00</b>	<b>5.641.261.964,00</b>	<b>7.306.573.729,00</b>	<b>6.145.708.534,00</b>



**V.3.2.1.3 Belanja Bunga** **Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja bunga (*nihil*).

**V.3.2.1.4 Belanja Subsidi** **Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja subsidi (*nihil*).

**V.3.2.1.5 Belanja Hibah** **Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja hibah (*nihil*).

**V.3.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial** **Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja bantuan sosial (*nihil*).

**V.3.2.2 Belanja Modal** **Rp362.303.965,00**

Total realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp362.303.965,00. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, serta belanja Gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	2025			2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	86.836.700,00	84.856.001,00	97,72	495.299.750,00	470.506.000,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	280.850.000,00	277.447.964,00	98,79	450.000.000,00	450.000.000,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>367.686.700,00</b>	<b>362.303.965,00</b>	<b>98,54</b>	<b>945.299.750,00</b>	<b>920.506.000,00</b>

Pada tahun 2025, DP3APPKB merealisasikan anggaran untuk belanja peralatan dan mesin. Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Belanja Tanah** **Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja tanah (*nihil*).

**2. Belanja Peralatan dan Mesin** **Rp84.856.001,00**

Pada tahun 2025 ini, rincian belanja peralatan dan mesin sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Harga Satuan	Harga
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			22.130.000,00
	• Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor – Filling Cabinet Besi (2), Rak Kayu (1)	3 unit	6.730.000,00	
	• Mebel – Kursi besi metal (kursi tunggu)	1 unit	1.800.000,00	
	• Alat Pendingin – AC Split	1 unit	13.600.000,00	
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			3.300.000,00
	• Peralatan Studio Video dan Film – Gimbal Stabilizer Kamera Studio	1 unit	3.300.000,00	



No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Harga Satuan	Harga
3	Komputer			59.426.001,00
	• Personal Computer – Laptop	1 unit	12.800.000,00	
	• Peralatan Personal Computer – Printer (4), Mini PC (2)	6 unit	40.626.000,00	
	• Peralatan Komputer Lainnya – Monitor	2 unit	6.000.001,00	
	<b>Total Belanja Peralatan dan Mesin</b>			<b>84.856.001,00</b>

**3. Belanja Gedung dan Bangunan Rp277.447.964,00**

Pada tahun 2025 ini, terdapat belanja gedung dan bangunan sebagai berikut:

No	Gedung dan Bangunan	Jumlah	Harga
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor DP3APPKB	1 unit	277.447.964,00
	<b>Total Belanja Gedung dan Bangunan</b>		<b>277.447.964,00</b>

**4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja jalan, irigasi dan jaringan (*nihil*).

**5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja aset tetap lainnya (*nihil*).

**6. Belanja Aset Lainnya Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada belanja aset tetap lainnya (*nihil*).

**V.3.3 Transfer Rp0,00**

DP3APPKB Kota Salatiga tidak memiliki anggaran transfer (*nihil*).

**V.3.4 Pembiayaan Rp0,00**

DP3APPKB Kota Salatiga tidak memiliki anggaran pembiayaan (*nihil*).

**V.3.4.1 Penerimaan Pembiayaan Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada penerimaan pembiayaan (*nihil*).

**V.3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00**

Pada tahun 2025 ini, tidak ada pengeluaran pembiayaan (*nihil*).

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Pendapatan	Rp	0,00
Belanja (-)	Rp	10.848.380.252,00
Transfer (-)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Surplus/defisit		Rp(10.848.380.252,00)
Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
<b>SILPA</b>		<b>Rp(10.848.380.252,00)</b>



#### 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca DP3APPKB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5.2.1	Aset	6.425.656.821,73	6.487.825.243,97
5.2.2	Kewajiban	9.634.543,00	5.955.170,00
5.2.3	Ekuitas	6.416.022.278,73	6.481.870.073,97

Penjelasan neraca sebagai berikut :

##### V.1.1 Aset Rp6.425.656.821,73

Total aset DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.425.656.821,73. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5.2.1.1	Aset Lancar	632.791.483,68	451.199.211,19
5.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
5.2.1.3	Aset Tetap	5.792.865.338,05	6.036.626.032,78
5.2.1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5.2.1.5	Aset lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.425.656.821,73</b>	<b>6.487.825.243,97</b>

Penjelasan :

##### V.1.1.1 Aset Lancar Rp632.791.483,68

Rincian asset lancar pada DP3APPKB adalah sebagai berikut:

##### V.1.1.1.1 Kas Rp0,00

Rekening ini menggambarkan saldo per 31 Desember 2025 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2025	2024
1	Kas di Bank	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Investasi Jangka Pendek - Deposito	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Kas di Bank per 31 Desember 2025 :

1.	Kas di Bank dengan Nomor Rekening 2.033.28275.6 (Bendahara Pengeluaran)	
	per 1 Januari 2025	0,00
	per 31 Desember 2025	0,00
	Selisih	0,00
2.	Kas di Bank dengan Nomor Rekening 3.033.30805.1 (Bendahara Gaji)	
	per 1 Januari 2025	0,00
	per 31 Desember 2025	0,00
	Selisih	0,00

**V.1.1.1.2 Piutang****Rp0,00**Pada tahun 2025 DP3APPKB tidak memiliki piutang (*nihil*).**V.1.1.1.3 Beban Dibayar Di Muka****Rp36.671.571,02**

Pada tahun 2025, terdapat beban dibayar di muka atas premi asuransi kendaraan dinas dan premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp36.671.571,02.

Gedung dan bangunan	15.884.156,05
Kendaraan dinas	20.787.414,97
<b>Total belanja dibayar di muka</b>	<b>36.671.571,02</b>

Belanja premi asuransi tersebut terdiri atas premi asuransi 1 (satu) unit gedung bangunan, dan 9 (sembilan) unit kendaraan dinas roda 4, yaitu :

## ● Premi Asuransi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jangka Waktu Pertanggungungan	Jumlah Hari	Besaran Premi (Rp)	Beban Premi (Rp)	Beban Dibayar Di Muka (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Kantor DP3APPKB	1 Nopember 2025 s.d 1 Nopember 2026 pukul 12 siang	365	19.040.121,00	3.155.964,95	15.884.156,05
			<b>Jumlah</b>	<b>19.040.121,00</b>	<b>3.155.964,95</b>	<b>15.884.156,05</b>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rincian perhitungannya sebagai berikut:

<b>Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi Gedung kantor</b>	
Premi =	Rp19.040.121,00
<b>Jangka waktu pertanggung : 1 Nopember 2025 s/d 1 Nopember 2026 pukul 12.00</b>	
Beban premi asuransi per hari :	$\frac{19.040.121,00}{365} = 52.164,71$
<b>Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :</b>	
( 1 Nopember 2025 s/d 31 Desember 2025 ) = 60,5 hari	
	$52.164,71 \times 60,50 = 3.155.964,95$
<b>Sehingga nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :</b>	
Belanja premi asuransi	= 19.040.121,00
Beban premi asuransi	= 3.155.964,95 -
<b>Belanja dibayar dimuka</b>	<b>= 15.884.156,05</b>

● Premi Asuransi Kendaraan Roda 4

No	No.Polisi Kendaraan	Jangka Waktu Pertanggung	Jumlah Hari	Besaran Premi (Rp)	Beban Premi (Rp)	Beban Dibayar Di Muka (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	H 1170 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	5.287.810,00	2.470.059,07	2.817.750,93
2	H 1306 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	3.485.785,00	1.628.290,34	1.857.494,66
3	H 7019 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	1.419.000,00	662.847,73	756.152,27
4	H 1086 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	3.677.650,00	1.717.915,37	1.959.734,63
5	H 1352 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	3.892.500,00	1.818.276,79	2.074.223,21
6	H 1353 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	3.892.500,00	1.818.276,79	2.074.223,21
7	H 1354 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	3.892.500,00	1.818.276,79	2.074.223,21
8	H 9573 DB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	7.955.285,00	3.716.102,06	4.239.192,94
9	H 7028 XB	14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12 siang	365	5.506.750,00	2.572.330,09	2.934.419,91
			<b>Jumlah</b>	<b>39.009.790,00</b>	<b>18.222.375,03</b>	<b>20.787.414,97</b>

Total belanja dibayar di muka asuransi kendaraan dinas sebesar Rp20.787.414,97 rincian perhitungannya sebagai berikut:



## 1. H 1170 XB

<b>Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1170 XB</b>			
Premi =	Rp5.287.810,00		
<b>Jangka waktu pertanggung : 14 Juli 2025 s/d 14 Juli 2026 pukul 12.00</b>			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{5.287.810,00}{365}$	= 14.487,15
<b>Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :</b>			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
	14.487,15	x	170,50 = 8.170.752,57
<b>Sehingga nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :</b>			
Belanja premi asuransi	=	5.287.810,00	
Beban premi asuransi	=	2.470.059,07	-
<b>Beban dibayar dimuka</b>	=	<b>2.817.750,93</b>	

## 2. H 1306 XB

<b>Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1306 XB</b>			
Premi :	Rp3.485.785,00		
<b>Jangka waktu pertanggung : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12</b>			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{3.485.785,00}{365}$	= 9.550,09
<b>Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :</b>			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
	9.550,09	x	170,50 = 1.628.290,34
<b>Sehingga nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :</b>			
Belanja premi asuransi	=	3.485.785,00	
Beban premi asuransi	=	1.628.290,34	-
<b>Beban dibayar dimuka</b>	=	<b>1.857.494,66</b>	

## 3. H 7019 XB

<b>Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 7019 XB</b>			
Premi :	Rp1.419.000,00		
<b>Jangka waktu pertanggung : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12</b>			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{1.419.000,00}{365}$	= 3.887,67
<b>Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :</b>			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
	3.887,67	x	170,50 = 662.847,73
<b>Sehingga nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :</b>			
Belanja premi asuransi	=	1.419.000,00	
Beban premi asuransi	=	662.847,73	-
<b>Beban dibayar dimuka</b>	=	<b>756.152,27</b>	



## 4. H 1086 XB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1086 XB			
Premi	:	Rp3.677.650,00	
Jangka waktu pertanggungungan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{3.677.650,00}{365}$	= 10.075,75
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$10.075,75 \times 170,50$	= 1.717.915,37
Sehingga nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=		3.677.650,00
Beban premi asuransi	=		1.717.915,37
<b>Beban dibayar dimuka</b>	<b>=</b>		<b>1.959.734,63</b>

## 5. H 1352 XB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1352 XB			
Premi	:	Rp3.892.500,00	
Jangka waktu pertanggungungan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{3.892.500,00}{365}$	= 10.664,38
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$10.664,38 \times 170,50$	= 1.818.276,79
Sehingga nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=		3.892.500,00
Beban premi asuransi	=		1.818.276,79
<b>Beban dibayar dimuka</b>	<b>=</b>		<b>2.074.223,21</b>

## 6. H 1353 XB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1353 XB			
Premi	:	Rp3.892.500,00	
Jangka waktu pertanggungungan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{3.892.500,00}{365}$	= 10.664,38
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 :			
( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$10.664,38 \times 170,50$	= 1.818.276,79
Sehingga nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=		3.892.500,00
Beban premi asuransi	=		1.818.276,79
<b>Beban dibayar dimuka</b>	<b>=</b>		<b>2.074.223,21</b>



## 7. H 1354 XB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 1354 XB			
Premi	:	Rp3.892.500,00	
Jangka waktu pertanggunggunaan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{3.892.500,00}{365}$	= 10.664,38
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 : ( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$10.664,38 \times 170,50$	= 1.818.276,79
Sehingga nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=	3.892.500,00	
Beban premi asuransi	=	1.818.276,79	
<b>Beban dibayar dimuka</b>	<b>=</b>	<b>2.074.223,21</b>	

## 8. H 9573 DB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 9573 DB			
Premi	:	Rp7.955.295,00	
Jangka waktu pertanggunggunaan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{7.955.295,00}{365}$	= 21.795,32
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 : ( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$21.795,32 \times 170,50$	= 3.716.102,06
Sehingga nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=	7.955.295,00	
Beban premi asuransi	=	3.716.102,06	
<b>Beban dibayar dimuka</b>	<b>=</b>	<b>4.239.192,94</b>	

## 9. H 7028 XB

Nilai belanja dibayar dimuka dari belanja premi asuransi kendaraan dinas H 7028 XB			
Premi	:	Rp5.506.750,00	
Jangka waktu pertanggunggunaan : 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2026 pukul 12			
Beban premi asuransi per hari :	=	$\frac{5.506.750,00}{365}$	= 15.086,98
Pengakuan beban premi asuransi selama tahun 2025 : ( 14 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025 ) : 170,5 hari			
		$15.086,98 \times 170,50$	= 2.572.330,09
Sehingga nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar :			
Belanja premi asuransi	=	5.506.750,00	
Beban premi asuransi	=	2.572.330,09	
<b>Belanja dibayar dimuka</b>	<b>=</b>	<b>2.934.419,91</b>	



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**V.1.1.1.4 Persediaan**

**Rp596.119.912,66**

Persediaan barang pakai habis pada DP3APPKB dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo awal persediaan tahun 2025 merupakan akumulasi dari saldo akhir persediaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp429.680.401,98. Kemudian ada penerimaan atau mutasi masuk sebesar Rp2.359.480.173,00. Sedangkan mutasi keluar sebesar Rp2.193.040.662,32, sehingga saldo akhir persediaan tahun 2025 DP3APPKB sebesar Rp596.119.912,66 yang rinciannya sebagai berikut :

No	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
2	Bahan Kimia	853.600,00	0,00	0,00	853.600,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	109.342.008,00	109.342.008,00	0,00
4	Bahan/bibit tanaman	683.900,00	1.666.800,00	488.500,00	1.862.200,00
5	Bahan Lainnya	0,00	2.924.200,00	456.000,00	2.468.200,00
6	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	21.669.006,00	21.669.006,00	0,00
7	Alat Tulis Kantor	74.554.634,08	37.167.100,00	33.868.816,32	77.852.917,76
8	Kertas dan Cover	11.601.100,00	24.181.000,00	19.148.500,00	16.633.600,00
9	Bahan Cetak	0,00	251.454.594,00	250.445.594,00	1.009.000,00
10	Benda Pos	1.520.000,00	4.370.000,00	4.940.000,00	950.000,00
11	Bahan Komputer	3.340.400,00	2.889.100,00	2.797.400,00	3.432.100,00
12	Perabot Kantor	6.398.850,00	13.488.600,00	8.917.350,00	10.970.100,00
13	Alat Listrik	11.846.400,00	10.493.900,00	11.619.500,00	10.720.800,00
14	Perlengkapan Dinas	0,00	141.069.500,00	140.539.500,00	530.000,00
15	Suvenir/ Cendera mata	0,00	24.962.000,00	24.962.000,00	0,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	206.000,00	28.959.600,00	29.165.600,00	0,00
17	Obat	318.675.517,90	403.591.633,00	253.849.756,00	468.417.394,90
18	Dijual/ diserahkan kepada	0,00	563.671.832,00	563.671.832,00	0,00
19	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	717.159.300,00	717.159.300,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>429.680.401,98</b>	<b>2.359.480.173,00</b>	<b>2.193.040.662,32</b>	<b>596.119.912,66</b>

Adapun rincian saldo akhir persediaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**1. Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp420.000,00**

Kondisi persediaan Bahan Kimia selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

Saldo awal untuk persediaan bahan bangunan dan konstruksi adalah Rp0,00 (nihil). Kemudian terdapat mutasi masuk senilai Rp420.000,00 dari belanja karpet sintetis pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Rincian saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Karpet Sintetis (Beludru)	420.000,00	1	420.000,00
		<b>420.000,00</b>	<b>1</b>	<b>420.000,00</b>

**2. Bahan Kimia Rp853.600,00**

Kondisi persediaan Bahan Kimia selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Kimia	853.600,00	1.666.800,00	1.666.800,00	853.600,00

Saldo awal untuk persediaan bahan kimia adalah Rp853.600,00.

Terdapat mutasi masuk dari pengadaan senilai Rp1.666.800,00, kemudian mutasi keluar karena diReklasifikasi ke persediaan bahan bibit tanaman senilai Rp1.666.800, sehingga saldo akhir menjadi senilai Rp853.600,00

Rincian saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2025 adalah :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Hypafix 10 cm x 5 cm BSN	130.900,00	4	523.600,00
2	Speculum Vagina Disposable L	11.000,00	30	330.000,00
			<b>34</b>	<b>853.600,00</b>

**3. Bahan Bakar dan Pelumas Rp0,00**

Kondisi persediaan Bahan Bakar dan Pelumas selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	109.342.008,00	109.342.008,00	0,00

Saldo awal untuk persediaan bahan bakar dan pelumas adalah Rp0,00 (nol). Kemudian terdapat mutasi masuk yang merupakan belanja bahan bakar dan pelumas pada kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota total senilai Rp109.342.008,00, dengan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp109.342.008,00 sehingga saldo akhir Rp0,00 (nol).

#### 4. Bahan / Bibit Tanaman Rp1.862.200,00

Kondisi persediaan bahan/bibit tanaman selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan/bibit tanaman	683.900,00	1.666.800,00	488.500,00	1.862.200,00

Saldo awal untuk persediaan bahan/bibit tanaman adalah Rp683.900,00. Kemudian terdapat mutasi masuk yang merupakan Reklasifikasi dari belanja bahan kimia pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, total senilai Rp1.666.800,00, dengan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp488.500,00 sehingga saldo akhir Rp1.862.200,00.

Nilai tersebut merupakan nilai persediaan bahan/bibit tanaman per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Herbisida	97.700,00	2	195.400,00
2	Herbisida 1 ltr	92.600,00	18	1.666.800,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>1.862.200,00</b>

#### 5. Bahan Lainnya Rp2.468.200,00

Kondisi persediaan bahan lainnya selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan lainnya	0,00	12.388.600,00	9.920.400,00	2.468.200,00

Saldo awal untuk persediaan bahan lainnya adalah Rp0,00 (nihil).

Kemudian terdapat mutasi masuk belanja bahan lainnya pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), total senilai Rp12.388.600,00, dengan mutasi keluar senilai Rp9.920.400,00 berupa :

- Reklasifikasi ke persediaan perabot kantor senilai Rp9.464.400,00
- beban pemakaian senilai Rp456.000,00

sehingga saldo akhir menjadi Rp2.468.200,00.

Nilai tersebut merupakan nilai bahan lainnya per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Mainan Edukasi Susun Paku Puzzle 296 pcs jamur	55.100,00	2	110.200,00
2	Mainan Ketok Pukul Palu kayu montessori (Balok Pukul isi 5/ paku palu)	100.000,00	1	100.000,00
3	Mainan Montessori Edukasi Anak susun (pink tower montessori)	58.000,00	1	58.000,00
4	Pagar bermain anak bahan HDPE Plastik	1.100.000,00	1	2.200.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>2.468.200,00</b>

## 6. Suku Cadang Alat Angkutan

**Rp0,00**

Kondisi persediaan suku cadang alat angkutan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Suku cadang alat angkutan	0,00	21.669.006,00	21.669.006,00	0,00

Saldo awal untuk persediaan suku cadang alat angkutan adalah 0 (nihil). Kemudian terdapat mutasi masuk yang merupakan belanja suku cadang alat angkutan pada kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah, total senilai



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp21.669.006,00, dengan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp21.669.006,00 sehingga saldo akhir Rp0,00 (nol).

**7. Alat Tulis Kantor**

**Rp77.852.917,76**

Kondisi persediaan ATK selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Alat Tulis Kantor	74.554.634,08	37.167.100,00	33.868.816,32	77.852.917,76

Saldo awal untuk persediaan persediaan ATK di adalah Rp74.554.634,08. Kemudian terdapat mutasi masuk senilai Rp37.167.100,00, dikurangi mutasi keluar Rp33.868.816,32 selama tahun berjalan sehingga saldo akhir persediaan ATK adalah sejumlah Rp77.852.917,76

Nilai tersebut merupakan nilai persediaan ATK per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Bolpoin Hi-Tech-H Kenko 0,28	6.100,00	5	30.500,00
2	Bolpoin Pentel	83.160,00	3	249.480,00
3	Bolpoin Pentel.	66.000,00	12	792.000,00
4	Ballpoint standar	29.076,09	29	843.206,61
5	Bolpoin Standar	28.500,00	38	1.083.000,00
6	Bolpoin Standar	29.900,00	48	1.435.200,00
7	Correction pen	41.580,00	18	748.440,00
8	Correction pen	40.808,55	5	204.042,75
9	Correction pen	8.600,00	8	68.800,00
10	File Box	28.500,00	16	456.000,00
11	Gunting besar	16.800,00	6	100.800,00
12	Isi Bolpoin Pentel	27.300,00	17	464.100,00
13	Isi Bolpoin Pentel	27.500,00	12	330.000,00
14	Karet gelang – ½ kg	37.400,00	1	37.400,00
15	Lem kertas cair 50ml	3.500,00	50	175.000,00
16	Lem Kertas cair - joyko 50 ml	3.700,00	24	88.800,00
17	Pensil 2B	4.800,00	17	81.600,00
18	Rautan Pensil	2.860,00	1	2.860,00
19	Sekat Arsip Uk. Folio	6.300,00	100	630.000,00
20	Sekat Arsip Uk. Folio	6.000,00	200	1.200.000,00
21	Spidol kecil 12 warna	25.850,00	3	77.550,00
22	Spidol permanent	10.400,00	16	166.400,00
23	Spidol whiteboard	10.890,00	18	196.020,00
24	Spidol whiteboard	10.800,00	12	129.600,00
25	Stabilo	12.100,00	14	169.400,00
26	Stabilo	12.242,57	4	48.970,28
27	Stabilo	11.900,00	10	119.000,00
28	Bantalan cap tanggung	9.000,00	8	72.000,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
29	Bantalan cap tanggung	12.100,00	2	24.200,00
30	Tinta Stempel	17.600,00	2	35.200,00
31	Tinta Stempel	18.363,85	6	110.183,10
32	Tinta stempel ungu	52.800,00	4	211.200,00
33	Binder clip 105	5.500,00	17	93.500,00
34	Binder clip 105	4.900,00	34	166.600,00
35	Binder clip 107	6.500,00	22	143.000,00
36	Binder clip 107	6.400,00	27	172.800,00
37	Binder clip 111	10.000,00	19	190.000,00
38	Binder clip 111	5.800,00	18	104.400,00
39	Binder clip 111	5.700,00	12	68.400,00
40	Binder clip 155	12.000,00	6	72.000,00
41	Binder clip 155	7.400,00	17	125.800,00
42	Binder clip 155	7.500,00	10	75.000,00
43	Binder clip 260	17.400,00	18	312.200,00
44	Paper clip no 3	2.500,00	7	17.500,00
45	Paper clip no 3 - zrm	2.100,00	94	197.400,00
46	Paper clip no 5	8.671,82	39	338.200,98
47	Paper clip no 5	8.600,00	27	232.200,00
48	Penhapus model kertas	7.600,00	33	250.800,00
49	Penghapus pensil - stedler	3.000,00	45	135.000,00
50	Penghapus whiteboard	9.350,00	6	56.100,00
51	Penghapus whiteboard	8.000,00	3	24.000,00
52	Blocknote garis besar 1/2 folio (50 lb)	6.631,39	261	1.730.792,79
53	Blocknote garis besar 1/2 folio (50 lb)	6.600,00	950	6.270.000,00
54	Buku ekspedisi	17.820,00	2	35.640,00
55	Buku ekspedisi	18.363,85	6	110.183,10
56	Buku ekspedisi	15.000,00	2	30.000,00
57	Buku ekspedisi	14.800,00	3	44.400,00
58	Buku folio isi 100	24.900,00	4	99.600,00
59	Buku folio isi 100	25.000,00	5	125.000,00
60	Buku folio isi 200	29.076,10	3	87.228,30
61	Buku kas folio	27.225,00	4	108.900,00
62	Buku tulis isi 38 - kiky	4.300,00	20	86.000,00
63	Buku tulis isi 58	6.400,00	1	6.400,00
64	Buku tulis isi 58	5.500,00	20	110.000,00
65	Kertas kraf	2.200,00	1	2.200,00
66	Bag folder	46.000,00	50	2.300.000,00
67	Bag folder	28.400,00	50	1.420.000,00
68	Bisnis file	42.000,00	6	252.000,00
69	Bisnis file	39.000,00	30	1.197.000,00
70	Bisnis file	40.000,00	5	200.000,00
71	Map folio kertas	1.500,00	352	528.000,00
72	Map gantung	5.200,00	548	2.849.600,00
73	Ordner folio	28.710,00	6	172.260,00
74	Ordner folio	28.565,99	10	285.659,90
75	Ordner folio	29.200,00	12	350.400,00
76	Perforator besar	69.300,00	1	69.300,00
77	Perforator besar	71.414,97	1	71.414,97
78	Perforator kecil	18.700,00	15	280.500,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
79	Snelhecter kertas - folio	1.500,00	592	888.000,00
80	Penggaris besi 30cm	8.360,00	3	25.080,00
81	Cutter kecil	7.500,00	5	37.500,00
82	Cutter kecil	7.300,00	12	87.600,00
83	Cutter kenko besar	17.000,00	11	187.000,00
84	Isi pisau cutter besar	9.181,93	2	18.363,86
85	Isi pisau cutter kecil	6.121,28	2	12.242,56
86	Tali rafia – 1 kg	26.500,00	5	132.500,00
87	Lakban bening	15.500,00	1	15.500,00
88	Lakban bening	13.700,00	5	68.500,00
89	Lakban kertas	20.783,00	3	62.349,00
90	Sticknote warna warni	9.900,00	16	158.400,00
91	Sticknote warna warni	9.400,00	58	545.200,00
92	Stapler kecil - zrm	12.700,00	14	177.800,00
93	Stapler max besar	69.300,00	6	415.800,00
94	Isi stapler besar	3.500,00	3	10.500,00
95	Amplop putih kop dinas/instansi/PKK/lain	39.000,00	4	156.000,00
96	Blanko disposisi ½ folio	83.900,00	1	83.900,00
97	Buku kwitansi	5.900,00	10	59.000,00
98	Buku kwitansi sedang	4.000,00	24	96.000,00
99	Genre kit	24.001.179,64	1	24.001.179,64
100	Kardus tempat arsip ukuran folio	25.000,00	194	4.850.000,00
101	Kartu stok barang	2.000,00	350	700.000,00
102	Kertas kop instansi	85.000,00	1	85.000,00
103	KIE Kit	4.661.177,96	2	9.322.355,92
104	KIE Kit	2.946.020,00	1	2.946.020,00
105	Stopmap berlogo dinas mengkilat	5.900,00	22	129.800,00
106	Roll banner KTR	315.000,00	1	315.000,00
107	Balpoint Tizoo hitam	59.900,00	2	119.800,00
108	Balpoint Tizo hitam gel 1.0	53.500,00	3	160.500,00
109	Isi stapler besar (dos)	43.560,00	3	130.680,00
110	Isi stapler besar (dos)	44.889,41	3	134.668,23
111	Isi stapler kecil (dos)	27.545,77	1	27.545,77
112	L folder	2.400,00	12	28.800,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>4.904</b>	<b>77.852.917,76</b>

**8. Kertas dan Cover**

**Rp16.633.600,00**

Kondisi persediaan Kertas dan Cover selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Kertas dan Cover	11.601.100,00	24.181.000,00	19.148.500,00	16.633.600,00

Saldo awal untuk persediaan persediaan kertas dan cover senilai Rp11.601.100,00. Kemudian terdapat mutasi masuk senilai Rp24.181.000,00 dikurangi mutasi keluar berupa pemakaian persediaan senilai Rp19.148.500,00 sehingga pada akhir



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Desember 2025, diperoleh saldo akhir untuk persediaan kertas dan cover senilai Rp16.633.600,00.

Saldo akhir persediaan kertas dan cover terinci seperti berikut :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Amplop samson D Kop Dinas	78.000,00	1	78.000,00
2	Amplop samson D Kop Dinas	77.500,00	2	155.000,00
3	Amplop samson dinas A	32.300,00	2	64.600,00
4	Amplop Kop Dinas	30.000,00	1	30.000,00
5	Blangko disposisi 1/2 folio (rim)	75.000,00	1	75.000,00
6	A2 NCR Polos	19.800,00	5	99.000,00
7	Kertas foto digital	28.000,00	1	28.000,00
8	Kertas HVS A4 70 gr	53.000,00	5	265.000,00
9	Kertas HVS F4	64.500,00	124	7.998.000,00
10	Kertas HVS Folio berwarna 70 gr	79.200,00	1	79.200,00
11	Kertas HVS Folio berwarna 70 gr	85.000,00	9	765.000,00
12	Kartu Kendali Surat Masuk	8.000,00	15	120.000,00
13	Kartu Kendali Surat Masuk	9.000,00	23	207.000,00
14	Kertas buram	32.200,00	4	128.800,00
15	Kertas fax	13.500,00	7	94.500,00
16	Kertas fax	18.200,00	10	182.000,00
17	Kertas fax	15.840,00	10	158.400,00
18	NCR Biru	70.000,00	5	350.000,00
19	NCR Biru	48.000,00	5	240.000,00
20	NCR Hijau	48.000,00	22	1.056.000,00
21	NCR Hijau	116.000,00	6	696.000,00
22	NCR Pink	48.000,00	12	576.000,00
23	Sticknote Memo	22.000,00	12	264.000,00
24	Amplop Besar	23.900,00	2	47.800,00
25	Amplop Besar	22.400,00	5	112.000,00
26	Amplop Kecil	12.400,00	10	124.000,00
27	Amplop Tanggung	18.400,00	104	1.913.600,00
28	Amplop Tanggung	16.900,00	43	726.700,00
	JUMLAH		<b>447</b>	<b>16.633.600,00</b>

**9. Bahan Cetak Rp1.009.000,00**

Kondisi persediaan bahan cetak selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Cetak	0,00	251.454.594,00	250.445.594,00	1.009.000,00

Saldo awal untuk persediaan bahan cetak adalah Rp0,00 (nihil). Kemudian terdapat mutasi masuk Rp251.454.594,00 yang berasal dari :

- pembelian sendiri, baik lewat kegiatan rutin Sekretariat maupun kegiatan Bidang Bidang Rp250.445.594,00
- mutasi masuk dari DPUPR Kota Salatiga senilai Rp694.000,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berupa Buku Perwali RDTR dan Lampiran Album Peta A3 RDTR)

- Mutasi masuk dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga (rollbanner) senilai Rp315.000,00

Kemudian mutasi kurang senilai Rp250.445.594,00 sehingga diperoleh saldo akhir Rp1.009.000,00.

Rincian persediaan bahan cetak per 31 Desember 2025 adalah :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Buku Perwali RDTR	214.000,00	1	214.000,00
2	Lampiran Album Peta A3 RDTR	480.000,00	1	480.000,00
3	Roll banner KTR	315.000,00	1	315.000,00
			<b>3</b>	<b>1.009.000,00</b>

#### 10. Benda Pos

**Rp950.000,00**

Kondisi persediaan benda pos dalam hal ini berupa materai selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Benda Pos	1.520.000,00	4.370.000,00	4.940.000,00	950.000,00

Saldo awal persediaan benda pos senilai Rp1.520.000,00, mutasi masuk dari pembelian senilai Rp4.370.000,00, dan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp4.940.000,00. Sehingga saldo akhir senilai Rp950.000,00.

Rincian persediaan benda pos per 31 Desember 2025 adalah :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Materai 10.000	10.000,00	95	950.000,00
			<b>95</b>	<b>950.000,00</b>

#### 11. Bahan Komputer

**Rp3.432.100,00**

Kondisi persediaan bahan komputer selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Bahan Komputer	3.340.400,00	2.889.100,00	2.797.400,00	3.432.100,00

Saldo awal persediaan bahan komputer Rp3.340.400,00, kemudian ada mutasi masuk dari pembelian senilai Rp2.889.100,00, dan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp2.797.400,00. Sehingga saldo akhir senilai



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rp3.432.100,00.

Rincian persediaan bahan komputer per 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Tinta printer epon	141.300,00	13	1.836.900,00
2	Tinta Printer Epson Black	104.400,00	2	208.800,00
3	Tinta Printer Epson warna	104.400,00	9	939.600,00
4	USB hub	140.000,00	1	140.000,00
5	Keyboard	76.700,00	4	306.800,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>3.432.100,00</b>

## 12. Perabot Kantor

**Rp10.970.100,00**

Kondisi persediaan perabot kantor selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Perabot Kantor	6.398.850,00	13.488.600,00	8.917.350,00	10.970.100,00

Saldo awal persediaan perabot kantor senilai Rp6.398.850,00, kemudian mutasi masuk senilai Rp13.488.600,00 yang berasal dari :

- Pembelian/ pengadaan Rp3.017.000,00
- Reklasifikasi dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya senilai Rp1.007.600,00 dan
- Reklasifikasi dari belanja bahan-bahan lainnya senilai Rp9.464.000,00.

Kemudian mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp8.917.350,00. Sehingga saldo akhir tahun 2025 adalah Rp10.970.100,00.

Saldo akhir persediaan perabot kantor terinci seperti berikut :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Sapu ijuk	24.200,00	1	96.800,00
2	Sapu lidi	18.500,00	3	55.500,00
3	Sikat kamar mandi	40.100,00	3	120.300,00
4	Sikat WC	18.600,00	3	55.800,00
5	Sulak	22.000,00	1	22.000,00
6	Sulak	20.900,00	4	83.600,00
7	Alat pembersih kaca	25.200,00	2	50.400,00
8	Box plastik roda 75 liter	125.900,00	4	503.600,00
9	Kain pel	52.100,00	5	260.500,00
10	Kanebo	79.000,00	2	158.000,00
11	Pel tangkai	99.200,00	2	198.400,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
12	Sabut asah	4.000,00	2	8.000,00
13	Serbet makan	17.500,00	5	105.000,00
14	Skrap pel	41.600,00	2	83.200,00
15	Skrap pel	39.100,00	5	195.500,00
16	Box tisu cover kain bordir	284.800,00	1	284.800,00
17	Tisu kotak	21.000,00	34	714.000,00
18	Tisu roll	3.300,00	70	231.000,00
19	Ember plastik tanggung	61.000,00	7	427.000,00
20	Gayung	12.600,00	3	37.800,00
21	Ekrak	29.000,00	3	87.000,00
22	Keranjang sampah plastik	44.900,00	3	134.700,00
23	Keset bahan karet besar	69.000,00	2	138.000,00
24	Tong sampah besar	179.300,00	2	358.600,00
25	Hand shop	19.200,00	41	787.200,00
26	Kit black magic	54.500,00	10	545.000,00
27	Pembersih kaca refill	6.600,00	72	475.200,00
28	Pembersih lantai SOS (refil) 50 ml	15.600,00	63	982.800,00
29	Pembersih porselen	12.500,00	3	37.500,00
30	Pembersih porselen	12.600,00	5	63.000,00
31	Sabun cuci piring	30.300,00	23	696.900,00
32	Sendok makan stainless doll	22.500,00	2	45.000,00
33	Parfum mobil gantung	32.300,00	11	355.300,00
34	Pengharum ruang stella	23.000,00	46	1.058.000,00
35	Pewangi kamar mandi	19.800,00	40	792.000,00
36	Baki nampan kayu jati	73.100,00	1	73.100,00
37	Piring makan	158.100,00	2	306.200,00
38	Stoples kaca	38.500,00	1	38.500,00
39	Taplak meja prasmanan rumbai	142.400,00	1	142.400,00
40	Tea set bahan keramik	94.700,00	1	94.700,00
41	Krat gelas bahan plastik	57.800,00	1	57.800,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>496</b>	<b>10.970.100,00</b>

### 13. Alat Listrik

**Rp10.720.800,00**

Kondisi persediaan alat listrik pada tahun 2025 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Alat Listrik	11.846.400,00	10.493.900,00	11.619.500,00	10.720.800,00

Saldo awal persediaan alat listrik senilai Rp11.846.400,00, mengalami mutasi tambah senilai Rp10.493.900,00 dan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp11.619.500,00 sehingga diperoleh saldo akhir Rp10.720.800,00 dengan rincian barang persediaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Lampu downlight	160.000,00	1	160.000,00
2	Lampu Emergency	187.000,00	4	748.000,00
3	Lampu LED (baru) 10 watt	105.000,00	7	735.000,00
4	Lampu LED (baru) 14 watt	155.900,00	2	311.800,00
5	Lampu TL	15.000,00	19	285.000,00
6	LED 14,5 w Philips	146.700,00	9	1.320.300,00
7	Stop kontak OB	14.700,00	6	88.200,00
8	Stop kontak	26.000,00	1	26.000,00
9	Saklar	18.000,00	10	180.000,00
10	Saklar tripel	30.500,00	6	183.000,00
11	Tespen	21.900,00	5	109.500,00
12	Tespen	21.500,00	4	86.000,00
13	Stater TL	5.000,00	14	70.000,00
14	Vitting gantung	8.300,00	3	24.900,00
15	Vitting plafon	12.500,00	5	62.500,00
16	Baterai Alkaline AA (pak)	19.100,00	1	19.100,00
17	Baterai Alkaline AAA (pak)	17.700,00	6	106.200,00
18	Baterai Alkaline AAA (pak)	24.500,00	22	539.000,00
19	Baterai Alkaline AAA (pak)	20.800,00	25	520.000,00
20	Baterai kotak	47.000,00	10	470.000,00
21	Batu baterai kotak 9v	42.500,00	6	255.000,00
22	Solasi Nasional	9.300,00	5	46.500,00
23	Lampu Taman Sorot 20w	312.000,00	2	624.000,00
24	Lampu Sorot 30 watt	490.600,00	2	981.000,00
25	Lampu Sorot 30 watt	490.600,00	6	2.769.600,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>181</b>	<b>10.720.800,00</b>

#### 14. Perlengkapan Dinas

**Rp530.000,00**

Kondisi persediaan perlengkapan dinas pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Perlengkapan Dinas	0,00	141.069.500,00	140.539.500,00	530.000,00

Saldo awal untuk persediaan perlengkapan dinas adalah 0 (nihil).

Kemudian terdapat mutasi masuk senilai Rp141.069.500,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi dari belanja pakaian olah raga (kaos) senilai total Rp102.284.500,00 pada sub kegiatan berikut:

No	Sub Kegiatan	Jumlah Rp.
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.708.500,00



2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.860.000,00
4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	29.304.000,00
5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	4.900.000,00
6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	43.512.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.284.500,00</b>

- Reklasifikasi dari belanja batik tradisional senilai total Rp38.255.000,00 pada sub kegiatan berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Rp.
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.855.000,00
2	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	7.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.255.000,00</b>

- RK dari Sekretariat Daerah berupa Gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota senilai Rp530.000,00

Mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp140.539.500,00 sehingga saldo akhir Rp530.000,00.

Rincian nilai saldo akhir tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Harga/ Unit	SALDO	
			Unit	Jumlah
1	Gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota	265.000,00	2	530.000,00
			<b>2</b>	<b>530.000,00</b>

## 15. Suvenir/Cenderamata

**Rp0,00**

Kondisi persediaan suvenir/cenderamata pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Suvenir/cenderamata	0,00	24.962.000,00	24.962.000,00	0,00

Saldo awal untuk persediaan suvenir/cenderamata adalah Rp0,00 (nihil). Kemudian terdapat mutasi masuk senilai Rp24.962.000,00



dengan mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp24.962.000,00 sehingga saldo akhir Rp0,00 (nol).

## 16. Persediaan Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

**Rp0,00**

Kondisi persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	206.000,00	28.959.600,00	29.165.600,00	0,00

Saldo awal tahun 2025 senilai Rp206.000,00, penambahan mutasi masuk untuk persediaan ini senilai Rp28.959.600,00. Kemudian, mutasi kurang pemakaian senilai Rp29.165.600,00 sehingga saldo pada akhir Desember 2025 adalah Rp0,00 (nol).

## 17. Obat

**Rp468.417.394,90**

Kondisi persediaan obat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Obat	318.675.517,90	403.591.633,00	253.849.756,00	468.417.394,90

Saldo awal persediaan obat senilai Rp318.675.517,90 kemudian ada mutasi masuk senilai Rp403.591.633,00 yang merupakan total nilai dropping dari BKKBN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. BAST	Nominal
1	06/02/2025	002/SP.04.01/J1/2025	29.377.468,00
2	12/03/2025	009/SP.04/J1/2025	127.024.778,00
3	08/05/2025	048/SP.06.01/J/2025	53.151.576,00
4	28/07/2025	083/SP.04/J1/2025	8.155.075,00
5	07/10/2025	136/SP.04/J1/2025	664.200,00
6	27/10/2025	147/SP.04/J1/2025	185.218.536,00
			<b>403.591.633,00</b>

Sedangkan mutasi keluar sebesar Rp253.849.756,00 yang terdiri dari :

- Beban pemakaian persediaan senilai Rp131.091.609,00 dan
- RK Persediaan obat ke DKK senilai Rp122.758.147,00.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

Sehingga saldo pada akhir Desember 2025 adalah  
Rp468.417.394,90.

Rincian nilai saldo akhir tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
1	Antiseptik 30 ml (Povidon Iodida)	2.900,00	257	745.300,00
2	Amoxicillin 500 mg (tablet)	553,00	4.000	2.212.000,00
3	Asam Mefenamat 500 mg (tablet)	304,00	4.400	1.337.600,00
4	Face mask (masker)	300,00	885	265.500,00
5	Obat Analgetik / Asam mafemanat	1.200,00	367	440.400,00
6	Obat Analgetik / Asam mafemanat	2.000,00	1270	2.540.000,00
7	Suntik KB Progestin	6.000,00	700	4.200.000,00
8	Suntik KB Kombinasi	12.000,00	240	2.880.000,00
9	Trocart	38.000,00	39	1.482.000,00
10	Kom Stainless	223.101,00	8	1.784.808,00
11	Lampu Halogen	1.759.312,00	2	3.518.624,00
12	Lampu Halogen SEJ/M-01	2.054.581,87	3	6.163.745,61
13	Mangkok Betadine	55.666,00	8	445.328,00
14	Gunting Iud	128.034,00	5	640.170,00
15	Sonde Uterus	133.601,00	1	133.601,00
16	Sonde Uterus	130.390,45	75	9.779.283,75
17	Sonde Uterus	88.776,48	10	887.764,80
18	Sonde Uterus	88.776,47	1	88.776,47
19	Klem Arteri	140.281,00	24	3.366.744,00
20	Tenacullum	122.467,00	5	612.335,00
21	Pengait Iud	128.034,00	4	512.136,00
22	Spekulum Vagina	115.787,00	10	1.157.870,00
23	Bak Instrumen Besar	578.936,00	8	4.631.488,00
24	Bak Instrumen Sedang	385.022,00	4	1.540.088,00
25	Sarung Tangan (Handscoon)	5.300,00	891	4.722.300,00
26	Kassa Gulung	113.146,00	1	113.146,00
27	Kassa Gulung	10.172,00	36	366.192,00
28	Kassa Gulung	10.173,00	32	325.536,00
29	Implant Removal Kit	2.561.703,00	1	2.561.703,00
30	Implant Removal Kit	1.760.000,00	2	3.520.000,00
31	Implant Removal Kit 2021	2.693.000,00	1	2.693.000,00
32	Kursi Roda 'Gea'	1.007.463,71	1	1.007.463,71
33	Klem Arteri Lurus 'Meiden'	51.401,21	5	257.006,05
34	Klem Arteri Bengkok 'Meiden'	51.401,21	5	257.006,05
35	Pincet Chirurgis 'Meiden'	18.504,44	10	185.044,40
36	Spekulum Vagina (S)'Meiden'	113.082,66	5	565.413,30
37	Spekulum Vagina (M)'Meiden'	123.362,90	5	616.814,50
38	Pengait Iud 'Meiden'	159.343,75	10	1.593.437,50
39	Bak Instrumen Sedang 'Meiden'	483.428,38	4	1.933.713,52
40	Tenakulum 'Meiden'	61.681,45	10	616.814,50
41	Gunting Iud 'Meiden'	61.681,45	10	616.814,50
42	Gunting Iud "Meiden"	152.584,57	4	610.338,28
43	Gunting Iud "Meiden"	152.584,65	1	152.584,65



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
44	Sonde Uterus 'Meiden'	51.401,21	7	359.808,47
45	Iud Kit & Sterilisator Listrik	8.119.400,00	6	48.716.400,00
46	IUD KIT dengan sterilisator dan lampu Periksa	7.879.599,10	3	23.638.797,30
47	IUD KIT dengan sterilisator dan lampu Periksa	7.879.599,13	1	7.879.599,13
48	IUD KIT 2021	4.897.250,00	1	4.897.250,00
49	Obat Anestesi lokal (Lidocain)	2.214,00	350	774.900,00
50	Phantom Implant/IUD	6.160.000,00	5	30.800.000,00
51	Phantom Implant	1.185.000,00	1	1.185.000,00
52	Phantom Implant IUD	1.685.000,00	1	1.685.000,00
53	MINI LAP KIT	7.180.800,00	1	7.180.800,00
54	VTP KIT	723.800,00	1	723.800,00
55	VTP KIT	2.198.020,00	1	2.198.020,00
56	Stetoskop	250.000,00	4	1.000.000,00
57	Sparepart Stetoskop	25.000,00	4	100.000,00
58	Uterine Sonde	125.000,00	1	125.000,00
59	Papan petunjuk Klinik	26.671,00	2	53.342,00
60	Implant KIT 2007	500.000,00	5	2.500.000,00
61	Crocodile	413.920,33	22	9.106.247,26
62	Arteri Klem	72.685,74	49	3.561.601,26
63	Arteri Klem	72.685,85	1	72.685,85
64	Tenaculum	182.546,63	24	4.381.119,12
65	Tenaculum	182.546,75	1	182.546,75
66	Klem U	72.685,74	17	1.235.657,58
67	Kassa Steril	375,00	27	10.125,00
68	Kassa Steril (492)	492,00	400	196.800,00
69	Kassa Steril (493)	493,00	1600	788.800,00
70	ADS	781,00	1908	1.490.148,00
71	ADS BMHP			
72	Implant II batang	150.015,00	427	64.056.405,00
73	Implant I batang	239.000,00	470	112.330.000,00
74	IUD Coper T	13.875,00	262	3.635.250,00
75	IUD Coper T Sleek	16.398,00	40	655.920,00
76	IUD Post partum	32.896,00	25	822.400,00
77	Pil KB Kombinasi	1.153,00	575	662.975,00
78	Pil KB Progestin/Mini pil	4.017,00	100	401.700,00
79	Pil KB Progestin/Mini pil	4.500,00	235	1.057.500,00
80	Dispo safe box (Safety Box)	26.589,00	12	319.068,00
81	Dispo safe box (Safety Box)	25.613,00	21	537.873,00
82	Dispo safe box (Safety Box)	14.000,00	44	616.000,00
83	Plester Antiseptik (Demafix T 10x8 cm)	3.700,00	891	3.296.700,00
84	Tempat Penyimpanan Kit Dan Alokon 2018	11.100.932,59	1	11.100.932,59
85	Tempat Penyimpanan Kit Dan Alokon 2019	11.372.400,00	3	34.117.200,00
86	Duk Steril	6.300,00	901	5.676.300,00
87	AC Swab	80,00	901	72.080,00
88	Lidocain 2% injeksi (56362048-1)	1.221,00	50	61.050,00
89	Amoxicillin 500 mg (TAMXB23197)	201,90	370	74.703,00



No	Uraian	Harga/ Unit	Saldo	
			Unit	Jumlah
			23.131	468.417.394,90

**18. Dijual/diserahkan kepada****Rp0,00**

Kondisi persediaan dijual/diserahkan kepada selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Diserahkan/ dijual kepada	0,00	563.671.832,00	563.671.832,00	0,00

Saldo awal persediaan Dijual/diserahkan kepada masyarakat senilai Rp0,00 (nol). Kemudian ada mutasi masuk sebesar Rp563.671.832,00 yang terdiri dari :

- belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp459.671.836,00

No	Sub Kegiatan	Nominal (Rp)	Jenis Barang	Sasaran
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.771.700,00	Sembako dan perlengkapan	Korban kekerasan (Perempuan)
2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	10.900.900,00	Sembako dan perlengkapan	Korban kekerasan (Anak)
3.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	443.999.236,00	Kuota Internet	Tim Pendamping Keluarga (pendata stunting tingkat kelurahan)
	<b>JUMLAH</b>	<b>459.671.836,00</b>		

- Reklasifikasi dari beban belanja TKDD yaitu 10 unit BKB Kit Stunting senilai Rp103.999.996,00, yang peruntukannya diserahkan kepada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) guna menjadi sarana kelompok untuk peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan mutasi keluar berupa beban pemakaian sebesar Rp563.671.832,00, Sehingga saldo akhir tahun 2025 adalah Rp0,00 (nol).



## 19. Natura

**Rp0,00**

Kondisi persediaan natura selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Persediaan	Saldo awal (1 Januari 2025)	Penerimaan / Mutasi Masuk (Rp)	Pemakaian / Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (31 Desember 2025)
1	Natura	0,00	717.159.300,00	717.159.300,00	0,00

Saldo awal persediaan natura adalah Rp0,00, kemudian terdapat mutasi masuk Rp717.159.300,00 berupa pembelian sendiri senilai Rp16.659.300,00 dan reklasifikasi senilai Rp700.500.000,00, yaitu :

- Reklasifikasi dari Natura dan pakan lainnya Rp116.361.000,00
- Reklasifikasi dari Makanan dan Minuman Rapat Rp578.635.000,00
- Reklasifikasi dari Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp5.504.000,00

Mutasi keluar berupa beban pemakaian senilai Rp717.159.300,00. Sehingga diperoleh saldo akhir Rp0,00 (nol).

### V.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

**Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki investasi jangka Panjang (*nihil*).

### V.1.1.3 Aset Tetap

**Rp5.792.865.338,05**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai Aset Tetap milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga per 31 Desember 2025 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2025.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.792.865.338,05. Mutasi penambahan berasal dari realisasi belanja modal tahun 2025 yang memenuhi kriteria sebagai aset dan mutasi masuk dari instansi lain, serta adanya Reklasifikasi dari kode barang lainnya.

Mutasi pengurangan berasal dari mutasi keluar ke instansi lain dan koreksi akumulasi penyusutan.

Penjelasan lebih lanjut Aset tetap adalah sebagai berikut :



No	Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Tanah	372.365.511,00	365.974.675,00
2.	Peralatan dan Mesin	6.341.156.092,89	6.245.800.091,89
3.	Gedung dan Bangunan	6.191.523.366,92	5.884.938.602,92
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.570.924,00	51.570.924,00
5.	Aset Tetap Lainnya	6.277.800,00	6.277.800,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(7.170.028.356,76)	(6.517.936.061,03)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.792.865.338,05</b>	<b>6.036.626.032,78</b>

Rincian aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**V.1.1.3.1 Tanah Rp372.365.511,00**

Jumlah aset tanah pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp372.365.511,00.

Saldo awal tanah tahun 2025 Rp365.974.675,00

Mutasi tambah 2025 (+) Rp 6.390.836,00

Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00

Saldo akhir tanah Tahun 2025 Rp372.365.511,00

Rincian atas tanah menurut jenisnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Tanah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Kantor (Jl. Hasanudin 114)	70.174.675,00	70.174.675,00
2.	Kantor (Jl. Hasanudin 110B)	279.000.000,00	279.000.000,00
3.	Kantor (Jl. Osamaliki 142)	16.800.000,00	16.800.000,00
4.	Kantor Penyuluh KB di Kecamatan Argomulyo (Jl. Argosari, Dukuh Tetep RT 01 RW 04 Randuacir)	6.390.836,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>372.365.511,00</b>	<b>365.974.675,00</b>

Penjelasan :

Jumlah Tanah pada awal tahun 2025 sebesar Rp365.974.675,00 kemudian ada mutasi tambah pada tanah bangunan kantor pemerintah yaitu atas pemecahan kebun induk Kecamatan Argomulyo yang digunakan untuk Gedung Balai KB seluas 356 m<sup>2</sup> (HP 66), dengan nilai perolehan sebesar Rp6.390.836,00 sehingga saldo akhir Tanah tahun 2025 menjadi Rp372.365.511,00.

No	Uraian	Jml Barang	Total	Keterangan
1.	Tanah	4	372.365.511,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>372.365.511,00</b>	

**V.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin****Rp6.341.156.092,89**

Jumlah aset peralatan dan mesin pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.341.156.092,89.

Saldo awal peralatan & mesin tahun 2025 Rp6.245.800.091,89

Mutasi tambah 2025 (+) Rp 95.356.001,00

Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00

Saldo akhir peralatan & mesin tahun 2025 Rp6.341.156.092,89

Rincian atas peralatan dan mesin menurut jenisnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Peralatan dan Mesin	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Alat Besar	0,00	0,00
2.	Alat Angkutan	3.904.868.326,00	3.904.868.326,00
3.	Alat Bengkel / Alat Ukur		0,00
4.	Alat Pertanian	5.545,456,00	5.545,456,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.168.922.421,35	1.146.792.421,35
6.	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	106.852.075,04	103.552.075,04
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	148.788.963,42	148.788.963,42
8.	Alat Laboratorium	10.700.000,00	10.700.000,00
9.	Komputer	994.428.851,08	924.502.850,08
10.	Peralatan Proses/Produksi	1.050.000,00	1.050.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.341.156.092,89</b>	<b>6.245.800.091,89</b>

Penjelasan :

Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp6.245.800.091,89 ditambah mutasi tambah selama tahun 2025 sebesar Rp95.356.001,00 dan tidak mutasi kurang sehingga saldo akhir peralatan dan mesin tahun 2025 senilai Rp6.341.156.092,89, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

a) Mutasi tambah Rp95.356.001,00

Mutasi tambah peralatan dan mesin di tahun 2025 dari Pengadaan SKPD dan juga hibah dari BKKBN berupa :

No	Uraian	Jml Barang	Total	Keterangan
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
	• Rak Kayu		770.000,00	Pengadaan SKPD
	• Filing Cabinet Besi	2	5.960.000,00	Pengadaan SKPD
2.	Meubelair			
	• Kursi Besi/Metal	1	1.800.000,00	Pengadaan SKPD
3	Alat Pendingin			
	• AC Split	2	13.600.000,00	Pengadaan SKPD
4	Peralatan Studio, Video, dan Film			



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Jml Barang	Total	Keterangan
	• Gimbal Stabilizer Kamera Studio	2	3.300.000,00	Pengadaan SKPD
5	Komputer Jaringan			
	• Mini Komputer	2	28.860.000,00	Pengadaan SKPD
6	Personal Komputer			
	• Laptop	1	12.800.000,00	Pengadaan SKPD
	• Laptop	1	10.500.000,00	Hibah BKKBN
7	Peralatan Personal Komputer			
	• Monitor	1	3.000.000,00	Pengadaan SKPD
	• Monitor	1	3.000.001,00	Pengadaan SKPD
	• Printer	4	11.766.000,00	Pengadaan SKPD
<b>Jumlah</b>			<b>95.356.001,00,00</b>	

b) Mutasi kurang Rp0,00

Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin di tahun 2025 (nihil).

**Barang Ekstra Komptabel ..... Rp90.035.883,37**

Barang Ekstra Komtable DP3APPKB Tahun 2025 sebagai berikut:

Saldo Awal ekstrakomtable 2025	Rp90.035.883,37
Mutasi Tambah 2025 (+)	Rp 0,00
Mutasi Kurang 2025 (-)	<u>Rp 0,00</u>
Saldo akhir barang extra komtable 2025	Rp90.035.883,37

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.507.028,37	89.507.028,37
2.	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00
3.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	201.789,00	201.789,00
4.	Alat Laboratorium	327.066,00	327.066,00
5.	Komputer	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.035.883,37</b>	<b>90.035.883,37</b>

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada ekstrakomtable peralatan dan mesin di tahun 2025 (nihil).

**Analisa Vertikal Horisontal LRA – Neraca**

Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp84.856.001,00, sedangkan pada Neraca kenaikan peralatan dan mesin sebesar Rp95.356.001,00 terdapat selisih Rp10.500.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

NO	URAIAN	LRA	SELISIH	NERACA	KETERANGAN
1	Rak Kayu	770.000,00	0,00	770.000,00	
2	Filing Cabinet Besi	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	
3	Kursi Besi/Metal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
4	AC Split	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	
5	Gimbal Stabilizer Kamera Studio	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	
6	Mini Komputer	28.860.000,00	0,00	28.860.000,00	
7	Laptop	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	
8	Laptop	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Hibah dari BKKBN
9	Monitor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
10	Monitor	3.000.001,00	0,00	3.000.001,00	
11	Printer	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>84.856.001,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95.356.001,00</b>	

**V.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

**Rp6.191.523.366,92**

Jumlah aset Gedung dan Bangunan pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.191.523.366,92

Saldo awal Gedung & Bangunan 2025 Rp5.884.938.602,92

Mutasi tambah 2025 (+) Rp 306.584.764,00

Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00

Saldo akhir Gedung & bangunan 2025 Rp6.191.523.366,92

Rincian atas gedung dan bangunan menurut jenisnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Gedung dan Bangunan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	5.930.937.926,92	5.624.353.162,92
2.	Monumen	0,00	0,00
3.	Bangunan Menara	0,00	0,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	260.585.440,00	260.585.440,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.191.523.366,92</b>	<b>5.884.938.602,92</b>

Penjelasan :

Jumlah Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp5.884.938.602,92 ditambah mutasi tambah selama tahun 2025 sebesar Rp306.584.764,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 sehingga saldo akhir Gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp6.191.523.366,92, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

a) Mutasi tambah Rp306.584.764,00

Mutasi tambah Gedung dan bangunan di tahun 2025 berupa :

1) Pemeliharaan gedung



No	Uraian	Jml Barang	Total	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor (Rehab Kantor DP3APPKB dan rehab Gedung Pusaka)	1	Belanja Modal = 277.447.964,00 Belanja Operasional = 29.136.800,00	No. Kontrak : 000.3/395 Tanggal : 26 Maret 2025 Addendum No. 000.3/497 tanggal 25 April 2025  No Kontrak : 000.3.2/404 tanggal 27 Maret 2025  No Kontrak : 00.7.4/188 tanggal 13 Februari 2025  No Kontrak : 000.3.2/405 tanggal 27 Maret 2025
<b>Jumlah</b>			<b>306.584.764,00</b>	

b) Mutasi kurang Rp0,00

Tidak ada mutasi kurang pada aset gedung dan bangunan di tahun 2025.

#### Analisa Vertikal Horisontal LRA – Neraca

Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp277.447.964,00, sedangkan pada Neraca kenaikan aset gedung dan bangunan sebesar Rp306.548.764,00 terdapat selisih Rp29.136.800,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	LRA	SELISIH	NERACA	KETERANGAN
1	Rehab Gedung kantor dan Gedung Pusaka	277.447.964,00	29.136.800	306.548.764,00	Belanja operasional atas Jasa konsultasi Arsitektur dan pengawasan
	<b>Jumlah</b>	<b>277.447.964,00</b>	<b>29.136.800</b>	<b>306.548.764,00</b>	

#### V.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp51.570.924,00

Jumlah aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp51.570.924,00.

Saldo awal JIJ 2025 Rp51.570.924,00

Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00

Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00

Saldo akhir JIJ 2025 Rp 51.570.924,00

Rincian atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Jalan Dan Jembatan	0,00	0,00
2.	Bangunan Air	51.570.924,00	51.570.924,00
3.	Instalasi	0,00	0,00
4.	Jaringan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>51.570.924,00</b>	<b>51.570.924,00</b>

Penjelasan :

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada asset tetap jalan, irigasi dan jaringan (*nihil*).

**Analisa Vertikal Horisontal LRA – Neraca**

Tidak terdapat selisih antara nilai asset Jalan, irigasi dan jaringan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada tahun 2025.

**V.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp6.277.800,00**

Jumlah aset tetap lainnya pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.277.800,00.

Saldo awal asset tetap lainnya 2025 Rp6.277.800,00

Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00

Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00

Saldo akhir asset tetap lainnya 2025 Rp6.277.800,00

Rincian atas asset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Aset Tetap Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Bahan Perpustakaan	6.277.800,00	6.277.800,00
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00
3.	Hewan	0,00	0,00
4.	Biota Perairan	0,00	0,00
5.	Tanaman	0,00	0,00
6.	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.277.800,00</b>	<b>6.277.800,00</b>

Penjelasan :

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada asset tetap lainnya (*nihil*).

**Analisa Vertikal Horisontal LRA – Neraca**

Tidak terdapat selisih antara nilai asset tetap lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada tahun 2025.



**V.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00**

Jumlah konstruksi dalam pengerjaan pada DP3APPKB Kota Salatiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Penjelasan :

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (*nihil*).

**Analisa Vertikal Horisontal LRA – Neraca**

Tidak terdapat selisih antara nilai konstruksi dalam pengerjaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada tahun 2025.

**V.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp7.170.028.356,76**

Pada tahun 2025, aset tetap pada DP3APPKB Kota Salatiga memiliki nilai penyusutan yang terakumulasi sebesar Rp7.170.028.356,76. Penyusutan tersebut terjadi pada golongan aset peralatan dan mesin; aset gedung dan bangunan; dan aset jalan, irigasi dan jaringan.

No	Akumulasi Penyusutan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Peralatan & mesin	5.686.371.165,69	5.409.455.448,85
2.	Gedung & bangunan	1.471.910.779,37	1.098.023.473,58
3.	Jalan, Irigasi, Jaringan	11.746.411,70	10.457.138,60
	<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>7.170.028.356,76</b>	<b>6.517.936.061,03</b>

Penjelasan secara terinci adalah sebagai berikut :

**(1) Peralatan dan Mesin Rp5.686.371.165,69**

Jumlah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp5.686.371.165,69 dan nilai buku tahun 2025 sebesar Rp654.784.927,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal 2025 Rp6.245.800.091,89
- Mutasi tambah 2025 (+) Rp 95.356.001,00
- Mutasi Kurang 2025 (-) Rp 0,00
- Harga perolehan 2025 Rp6.341.156.092,89
- Akumulasi penyusutan 2025 (-) Rp5.686.371.165,69

Nilai buku peralatan & Mesin th 2025 Rp 654.784.927,00

Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Alat Besar	0,00	0,00



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2.	Alat Angkutan	3.562.278.611,71	3.372.074.397,40
3.	Alat Bengkel / Alat Ukur	0,00	0,00
4.	Alat Pertanian	5.545.456,00	5.545.456,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.063.235.459,31	1.029.275.306,91
6.	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	68.670.075,04	57.381.075,04
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	97.098.463,42	86.760.363,42
8.	Alat Laboratorium	8.025.000,00	10.700.000,00
9.	Komputer	880.468.100,21	846.668.850,08
10.	Peralatan Proses/Produksi	1.050.000,00	1.050.000,00
	<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>5.686.371.165,69</b>	<b>5.409.455.448,85</b>

**(2) Gedung dan Bangunan Rp1.471.910.779,37**

Jumlah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp1.471.910.779,37 dan nilai buku tahun 2025 sebesar Rp4.719.612.587,55 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal 2025 Rp5.884.938.602,92
- Mutasi tambah 2025 (+) Rp 306.584.764,00
- Mutasi Kurang 2025 (-) Rp 0,00
- Harga perolehan 2025 Rp6.191.523.366,92
- Akumulasi penyusutan 2025 (-) Rp1.471.910.779,37

Nilai buku gedung & bangunan th 2025 Rp4.719.612.587,55

Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	1.425.889.963,17	1.057.214.366,18
2.	Monumen	0,00	0,00
3.	Bangunan Menara	0,00	0,00
4.	Tugu Tanda Batas	46.020.816,20	40.809.107,40
	<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>1.471.910.779,37</b>	<b>1.098.023.473,58</b>

**(3) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp11.746.411,70**

Jumlah akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp11.746.411,70 dan nilai buku tahun 2025 sebesar Rp39.824.512,30 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal 2025 Rp51.570.924,00
- Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Mutasi Kurang 2025 (-) Rp 0,00
  - Harga perolehan 2025 Rp51.570.924,00
  - Akumulasi penyusutan 2025 (-) Rp11.746.411,70
- Nilai buku JIJ th 2025 Rp39.824.512,30

Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Jalan Dan Jembatan	0,00	0,00
2.	Bangunan Air	11.746.411,70	10.457.138,00
3.	Instalasi	0,00	0,00
4.	Jaringan	0,00	0,00
	<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>11.746.411,70</b>	<b>10.457.138,00</b>

**V.1.1.4 Dana Cadangan Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki dana cadangan (*nihil*).

**V.1.1.5 Aset Lainnya Rp0,00**

Aset lainnya pada DP3APPKB Kota Salatiga berupa aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

**V.1.1.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki tuntutan ganti kerugian daerah (*nihil*).

**V.1.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki kemitraan dengan pihak ketiga (*nihil*).

**V.1.1.5.3 Aset tak Berwujud Rp108.220.000,00**

Aset tak berwujud di DP3APPKB Kota Salatiga berupa aplikasi E-kontrasepsi dan aplikasi data SIGA dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	108.220.000,00	108.220.000,00
	<b>Total ATB</b>	<b>108.220.000,00</b>	<b>108.220.000,00</b>

- Saldo Awal 2025 Rp108.220.000,00
- Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00
- Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00



- Saldo akhir 2025 Rp108.220.000,00

Penjelasan:

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Tak Berwujud (nihil).

#### V.1.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

**(Rp108.220.000,00)**

Dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	(108.220.000,00)	(108.220.000,00)
	<b>Total akumulasi amortisasi ATB</b>	<b>(108.220.000,00)</b>	<b>(108.220.000,00)</b>

- Saldo Awal 2025 (Rp108.220.000,00)
  - Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00
  - Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00
  - Harga perolehan 2025 (Rp 108.220.000,00)
  - Akumulasi penyusutan sd 2025 (-) (Rp108.220.000,00)
- Nilai buku ATB tahun 2025 Rp 0,00

#### V.1.1.5.5 Aset Lain-lain

**Rp0,00**

Kondisi aset lain-lain di DP3APPKB Kota Salatiga adalah berikut:

- Saldo Awal 2025 Rp 0,00
- Mutasi tambah 2025 (+) Rp 0,00
- Mutasi kurang 2025 (-) Rp 0,00
- Saldo akhir 2025 Rp 0,00

Penjelasan :

Tidak ada Mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset lain-lain di tahun 2025 (nihil).

### V.1.2 Kewajiban

**Rp9.634.543,00**

#### V.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

**Rp9.634.543,00**

Kewajiban jangka pendek pada DP3APPKB Kota Salatiga memiliki kewajiban dalam bentuk utang belanja, yaitu utang belanja jasa tenaga administrasi, tagihan telepon, air, listrik dan internet atas pemakaian bulan Desember 2025 sebesar Rp9.634.543,00 dengan perincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Tenaga Administrasi	2.533.583,00
2	Tagihan telepon	103.071,00
3	Tagihan air	1.487.700,00
4	Tagihan listrik	3.896.239,00
5	Internet	1.613.950,00
	<b>Total</b>	<b>9.634.543,00</b>

**V.1.2.2 Kewajiban Jangka Panjang** **Rp0,00**

DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 tidak memiliki kewajiban jangka panjang (*nihil*).

**V.1.3 Ekuitas** **Rp6.416.022.278,73**

Ekuitas Dinas PPPAPPKB Kota Salatiga Tahun 2025 senilai Rp6.416.022.278,73, berasal dari :

Ekuitas Awal	6.481.870.073,97
Surplus/Defisit-LO	(10.560.885.506,45)
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Lain-Lain	(354.881.540,79)
Akun Untuk Dikonsolidasikan	10.849.919.252,00
Ekuitas Akhir	6.416.022.278,73

Nilai ini menggambarkan kekayaan bersih investasi DP3APPKB Kota Salatiga, yakni selisih antara nilai Aset dan Kewajiban, jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 yang merupakan jumlah ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar Rp6.416.022.278,73.

**4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional**

Laporan Operasional DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 adalah :

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5.3.1	Pendapatan	414.091.633,00	217.477.300,00
5.3.2	Beban	10.974.977.139,45	11.696.012.110,08
5.3.3	Surplus/Defisit LO	(10.560.885.506,45)	(11.478.534.810,08)

Penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**V.2.1 Pendapatan** **Rp414.091.633,00**

**V.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah** **Rp0,00**

**V.2.1.2 Pendapatan Transfer** **Rp.0,00**

**V.2.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah** **Rp414.091.633,00**

**V.2.1.3.1 Pendapatan Hibah** **Rp414.091.633,00**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, DP3APPKB Kota Salatiga memiliki lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah sebesar Rp414.091.633,00 yang merupakan dropping alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah senilai Rp403.591.633,00 dan 1 unit Laptop senilai Rp10.500.000,00 dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebagai pemberian penghargaan dalam bentuk barang dalam rangka Pemutakhiran Data Pendataan Keluarga 2025, dengan rincian sebagai berikut (*Berita Acara Terlampir*) :

No	Tang gal	Nomor BAST	Banyaknya		Nama Barang	Harga (Rp)		Ket
			Jml	Satuan		Satuan	Jumlah	
1	06/02 /2025	002/SP. 04.01/J1 /2025	200	unit	IUD Coper T	13.875,00	2.775.000,00	Obat
			444	lusin	Kondom.	10.395,00	4.615.380,00	
			100	vial	Suntik KB Kombinasi	12.000,00	1.200.000,00	
			500	vial	Suntik KB Progestin.	6.000,00	3.000.000,00	
			600	buah	ADS.	781,00	468.600,00	
			6	buah	Dispo safe box' (Safety Box)	14.000,00	84.000,00	
			100	set	Implant II batang	150.015,00	15.001.500,00	
			100	buah	Masker	300,00	30.000,00	
			100	buah	AC Swab	80,00	8.000,00	
			200	buah	kassa steril	375,00	75.000,00	
			20	botol	Povidon Iodida 30 ml (antiseptik)	2.900,00	58.000,00	
			100	strip	Obat Analgetik / Asam Mefenamat	2.000,00	200.000,00	
			100	buah	Plester Antiseptik (Demafix T 10x8 cm)	3.700,00	370.000,00	
			100	pasang	Sarung Tangan (Handscoon)	5.300,00	530.000,00	
			100	buah	Duk Steril	6.300,00	630.000,00	
			100	buah	ADS BMHP	699,00	69.900,00	
			4	pack	Kassa Gulung.	10.172,00	40.688,00	
			100	ampul	Obat Anastesi lokal (Lidocain)	2.214,00	221.400,00	
							<b>29.377.468,00</b>	
2	12/03 /2025	009/SP. 04/J1/2 025	150	unit	IUD Coper T	13.875,00	2.081.250,00	Obat
			50	unit	IUD Coper T Sleek.	16.398,00	819.900,00	
			500	siklus	Pil KB Kombinasi.	1.153,00	576.500,00	
			200	siklus	Pil KB Progestin /Mini pil	4.500,00	900.000,00	
			300	vial	Suntik KB Progestin.	6.000,00	1.800.000,00	
			400	vial	Suntik KB Kombinasi	12.000,00	4.800.000,00	
			700	buah	ADS.	781,00	546.700,00	
			7	buah	Dispo safe box' (Safety Box)	14.000,00	98.000,00	
			300	set	Implant I batang	190.000,00	57.000.000,00	
			300	set	Implant II batang	150.015,00	45.004.500,00	
			600	buah	ADS BMHP	699,00	419.400,00	
			600	ampul	Obat Anastesi lokal (Lidocain)	2.214,00	1.328.400,00	
			600	buah	Duk Steril	6.300,00	3.780.000,00	



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tang gal	Nomor BAST	Banyaknya		Nama Barang	Harga (Rp)		Ket
			Jml	Satuan		Satuan	Jumlah	
1	2	3	4		5	6	7	8
			600	pasang	Sarung Tangan (Handscoon)	5.300,00	3.180.000,00	
			600	buah	Plester Antiseptik (Demafix T 10x8 cm)	3.700,00	2.220.000,00	
			600	strip	Obat Analgetik / Asam Mefenamat	2.000,00	1.200.000,00	
			600	buah	Masker	300,00	180.000,00	
			120	botol	Povidon Iodida 30 ml (antiseptik)	2.900,00	348.000,00	
			1200	buah	Kassa Steril	375,00	450.000,00	
			600	buah	AC Swab	80,00	48.000,00	
							<b>127.024.778,00</b>	
3	08/05 /2025	048/SP. 06.01/1/ 2025	25	unit	IUD Post partum	32.896,00	822.400,00	Obat
			200	set	Implant I batang.	239.000,00	47.800.000,00	
			200	buah	ADS.	781,00	156.200,00	
			200	ampul	Obat Anastesi lokal (Lidocain)	2.214,00	442.800,00	
			200	buah	Duk Steril	6.300,00	1.260.000,00	
			200	pasang	Sarung Tangan (Handscoon)	5.300,00	1.060.000,00	
			200	buah	Plester Antiseptik (Demafix T 10x8 cm)	3.700,00	740.000,00	
			200	strip	Obat Analgetik / Asam Mefenamat	2.000,00	400.000,00	
			200	buah	Masker	300,00	60.000,00	
			200	buah	AC Swab	80,00	16.000,00	
			40	botol	Povidon Iodida 30 ml (antiseptik)	2.900,00	116.000,00	
			400	buah	Kassa Steril (492)	492,00	196.800,00	
8	pack	Kassa Gulung.	10.172,00	81.376,00				
							<b>53.151.576,00</b>	
4	28/07 /2025	083/SP. 04/11/2 025	175	unit	IUD Coper T	13.875,00	2.428.125,00	Obat
			25	unit	IUD Coper T Sleek.	16.398,00	409.950,00	
			500	siklus	Pil KB Kombinasi.	1.153,00	576.500,00	
			300	siklus	Pil KB Progestin /Mini pil	4.500,00	1.350.000,00	
			500	vial	Suntik KB Progestin.	6.000,00	3.000.000,00	
			500	buah	ADS.	781,00	390.500,00	
							<b>8.155.075,00</b>	
5	27/10 /2025	147/SP. 04/11/2 025	300	ampul	Obat Anastesi lokal (Lidocain)	2.214,00	664.200,00	Obat
			300	unit	IUD Coper T	13.875,00	4.162.500,00	
			500	vial	Suntik KB Progestin.	6.000,00	3.000.000,00	
			400	vial	Suntik KB Kombinasi	12.000,00	4.800.000,00	
			400	set	Implant II batang	150.015,00	60.006.000,00	
			400	set	Implant I batang.	239.000,00	95.600.000,00	
			1.700	buah	ADS.	781,00	1.327.700,00	
			800	pasang	Sarung Tangan (Handscoon)	5.300,00	4.240.000,00	
			800	buah	Plester Antiseptik (Demafix T 10x8 cm)	3.700,00	2.960.000,00	
			800	buah	Masker	300,00	240.000,00	
			800	buah	Duk Steril	6.300,00	5.040.000,00	
			1.600	buah	Kassa Steril (493)	493,00	788.800,00	
			32	pack	Kassa Gulung.	10.173,00	325.536,00	
			800	buah	AC Swab	80,00	64.000,00	
160	botol	Povidon Iodida 30 ml (antiseptik)	2.900,00	464.000,00				
1.100	strip	Obat Analgetik / Asam Mefenamat	2.000,00	2.200.000,00				
							<b>185.882.736,00</b>	
<b>TOTAL OBAT</b>						<b>403.591.633,00</b>		
			1	unit	Laptop	10.500.000,00	10.500.000,00	Laptop
<b>TOTAL LAPTOP</b>						<b>10.500.000,00</b>		
<b>TOTAL PENDAPATAN HIBAH</b>						<b>414.091.633,00</b>		



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**V.2.1.4 Beban**

**Rp10.974.977.139,45**

Besarnya beban yang dimiliki DP3APPKB Kota Salatiga pada tahun 2025 adalah Rp10.974.977.139,45, yang terdiri atas beban-beban sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	4.844.814.323,00	4.724.633.491,00
2	Beban Persediaan	2.069.902.515,32	2.358.891.717,83
3	Beban Jasa	1.535.603.060,32	2.068.787.831,29
4	Beban Pemeliharaan	99.587.220,00	61.115.434,00
5	Beban Perjalanan Dinas	1.509.886.960,00	1.917.521.119,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	501.225.000,00	
9	Beban Hibah	0,00	0,00
10	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan	413.958.065,94	565.062.516,96
12	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
13	Beban Transfer	0,00	0,00
14	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>10.974.977.139,45</b>	<b>11.696.012.110,08</b>

Penjelasan atas beban-beban tersebut adalah sebagai berikut:

**V.2.1.4.1 Beban Pegawai**

**Rp4.844.814.323,00**

Beban pegawai terdiri dari :

Beban Pegawai		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Gaji Pokok ASN	1.818.286.385,00	1.799.228.335,00
2	Tunjangan Keluarga	171.758.422,00	161.843.034,00
3	Tunjangan Jabatan	107.890.000,00	140.470.000,00
4	Tunjangan Fungsional	96.352.000,00	60.915.780,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	45.445.000,00	44.725.000,00
6	Tunjangan Beras	93.977.020,00	88.859.340,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.043.233,00	13.824.679,00
8	Pembulatan Gaji	24.821,00	25.243,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan	148.203.403,00	144.347.390,00
10	Iuran JKK	3.735.500,00	3.692.710,00
11	Iuran JKM	11.206.601,00	11.078.265,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.945.332.802,00	844.520.889,00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	373.720.931,00	144.766.413,00
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	9.838.205,00	15.994.300,00
15	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	1.230.182.113,00
16	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan obyektif lainnya ASN	0,00	20.160.000,00
	<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>4.844.814.323,00</b>	<b>4.724.633.491,00</b>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Analisis Vertikal Horizontal LRA – Laporan Operasional**

Jumlah belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran DP3APPKB Kota Salatiga sebesar Rp4.844.814.323,00 dan Beban pegawai-LO sama sebesar Rp4.844.814.323,00, sehingga tidak terdapat selisih (nihil).

**V.2.1.4.2 Beban Persediaan**

**Rp2.069.902.515,32**

Merupakan beban barang pakai habis sebesar Rp2.069.902.515,32 terdiri dari:

Beban Barang Pakai Habis (Persediaan)		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Bahan Kimia	0,00	165.411,00
2	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	109.342.008,00	111.307.826,00
3	Beban Bahn/Bibit Tanaman	488.500,00	488.500,00
4	Beban Bahan Lainnya	456.000,00	342.000,00
5	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	21.669.006,00	13.690.815,00
6	Beban Suku Cadang Lainnya	0,00	5.904.500,00
7	Beban Alat Tulis Kantor	33.868.816,32	78.647.387,51
8	Beban Kertas dan Cover	19.148.500,00	17.959.300,00
9	Beban Bahan Cetak	250.065.594,00	285.545.950,00
10	Beban Benda Pos	4.940.000,00	5.830.000,00
11	Beban Bahan Komputer	2.797.400,00	4.195.000,00
12	Beban Perabot Kantor	8.917.350,00	11.078.100,00
13	Beban Alat Listrik	11.619.500,00	6.783.100,00
14	Perlengkapan Dinas	140.539.500,00	103.681.400,00
15	Beban Suvenir/Cenderamata	24.962.000,00	51.324.500,00
16	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	29.165.600,00	34.836.400,0
17	Beban Obat	131.091.609,00	109.315.708,32
18	Beban obat obatan Lainnya	0,00	0,00
19	Beban untuk Dijual/Diserahkan kpd Masy	*) 563.671.832,00	825.582.400,00
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	22.858.420,00
21	Beban Natura dan Pakan	717.159.300,00	669.355.000,00
	<b>Jumlah Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>2.069.902.515,32</b>	<b>2.358.891.717,83</b>

Penjelasan :

\*) Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat rinciannya sebagai berikut :

NO	URAIAN	Rp.
1	Sembako dan perlengkapan bagi korban kekerasan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	4.771.700,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URAIAN	Rp.
2	Sembako dan perlengkapan bagi Korban kekerasan pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	10.900.900,00
3	Kuota Internet bagi 444 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) pendata stunting tingkat kelurahan pada sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita	443.999.236,00
4	Reklasifikasi dari belanja TKDD ke persediaan berupa set BKB Kit Stunting untuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	103.999.996,00
	<b>Jumlah</b>	<b>563.671.832,00</b>

### Analisis Vertikal Horizontal LRA – Laporan Operasional

Jumlah belanja Persediaan Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran DP3APPKB Kota Salatiga sebesar Rp1.850.349.544,00 sedangkan Beban persediaan-LO sebesar Rp2.069.902.515,32 terdapat selisih Rp219.552.971,32 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Belanja (LRA)	Saldo Awal	Beban (LO)	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5	6 = (4+5)-(2+3)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Bahan Kimia	1.666.800,00	853.600,00	0,00	853.600,00	(1.666.800,00)
Bahan Bakar dan Pelumas	109.342.008,00	0,00	109.342.008,00	0,00	0,00
Bahn/Bibit Tanaman		683.900,00	488.500,00	1.862.200,00	1.666.800,00
Bahan Lainnya	2.388.600,00	0,00	456.000,00	2.468.200,00	9.464.400,00)
Suku Cadang Alat Angkutan	21.669.006,00	0,00	21.669.006,00	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	33.346.100,00	74.554.634,08	33.868.816,32	77.852.917,76	3.821.000,00
Kertas dan Cover	21.731.000,00	11.601.100,00	19.148.500,00	16.633.600,00	2.450.000,00
Bahan Cetak	256.716.594,00	0,00	250.065.594,00	1.009.000,00	(5.642.000,00)
Benda Pos	4.370.000,00	1.520.000,00	4.940.000,00	950.000,00	0,00
Bahan Komputer	2.889.100,00	3.340.400,00	2.797.400,00	3.432.100,00	0,00
Perabot Kantor	3.017.000,00	6.398.850,00	8.917.350,00	10.970.100,00	10.471.600,00
Alat Listrik	10.493.900,00	11.846.400,00	11.619.500,00	10.720.800,00	0,00
Perlengkapan Dinas		0,00	140.539.500,00	530.000,00	41.069.500,00
Suvenir/Cenderamata	24.962.000,00	0,00	24.962.000,00	0,00	0,00
Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	29.966.800,00	206.000,00	29.165.600,00	0,00	(1.007.200,00)
Obat	0,00	318.675.517,90	131.091.609,00	468.417.394,90	280.833.486,00
Untuk Dijual/Diserahkan kpd Masy	459.671.836,00	0,00	563.671.832,00	0,00	103.999.996,00
Natura dan Pakan	16.659.300,00	0,00	717.159.300,00	0,00	700.500.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	694.756.000,00	0,00	0,00	0,00	(694.756.000,00)
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.744.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.744.000,00)
Pakaian Batik Tradisional	38.255.000,00	0,00	0,00	0,00	(38.255.000,00)
Pakaian Olahraga	102.284.500,00	0,00	0,00	0,00	(102.284.500,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.850.349.544,00</b>		<b>2.069.902.515,32</b>		<b>219.552.971,32</b>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penjelasan :

a. Beban Bahan Bangunan dan konstruksi

Jumlah Beban Bahan Bangunan dan konstruksi sama dengan jumlah Belanja Bahan bangunan dan konstruksi yaitu sebesar Rp420.000,00

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	420.000,00
2	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	420.000,00
	Saldo akhir	
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

b. Beban Bahan Kimia

Jumlah Beban Bahan kimia Rp0,00 sedangkan jumlah Belanja Bahan kimia sebesar Rp1.666.800,00. Selisih tersebut karena adanya Reklasifikasi dari persediaan bahan kimia ke persediaan bibit tanaman senilai Rp1.666.800,00.

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	853.600,00
	Belanja Bahan kimia	1.666.800,00
2	Beban Bahan kimia	0,00
	Saldo akhir	853.600,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(1.666.800,00)</b>
	<i>Reklasifikasi persediaan bahan kimia ke persediaan bibit tanaman</i>	<i>(1.666.800,00)</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

c. Beban Bahan Bakar dan Pelumas

Jumlah Beban Bahan bakar dan pelumas sama dengan jumlah Belanja Bahan bakar dan pelumas yaitu sebesar Rp109.342.008,00

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja Bahan bakar dan pelumas	109.342.008,00
2	Beban Bahan bakar dan pelumas	109.342.008,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

d. Beban Bahan/Bibit Tanaman

Jumlah Beban bahan/bibit tanaman Rp488.500,00 sedangkan jumlah Belanja Bahan bahan/bibit tanaman sebesar Rp0,00. Selisih tersebut karena adanya Reklasifikasi dari persediaan bahan kimia ke persediaan bibit tanaman senilai Rp1.666.800,00.

NO	URAIAN	
----	--------	--



1	Saldo awal	683.900,00
	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00
2	Beban bahan/bibit tanaman	488.500,00
	Saldo akhir	1.862.200,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>1.666.800,00</b>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan bahan kimia ke persediaan bibit tanaman</i>	<i>1.666.800,00</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## e. Beban Bahan Lainnya

Jumlah Beban bahan lainnya Rp456.000,00 sedangkan jumlah Belanja Bahan bahan lainnya sebesar Rp12.388.600,00. Selisih tersebut karena adanya Reklasifikasi dari persediaan bahan lainnya ke persediaan perabot kantor senilai Rp9.464.400,00.

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja bahan lainnya	12.388.600,00
2	Beban bahan lainnya	456.000,00
	Saldo akhir	2.468.200,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(9.464.400,00)</b>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan bahan lainnya ke persediaan perabot kantor</i>	<i>(9.464.400,00)</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## f. Beban Suku Cadang Alat Angkutan

Jumlah Beban suku cadang alat angkutan sama dengan jumlah Belanja Bahan suku cadang alat angkutan sebesar Rp21.669.006,00, sehingga tidak ada selisih untuk jenis persediaan ini.

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja suku cadang alat angkutan	21.669.006,00
2	Beban suku cadang alat angkutan	21.669.006,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## g. Beban Alat Tulis Kantor

Jumlah Beban alat tulis kantor Rp33.868.816,32 dan jumlah Belanja alat tulis kantor sebesar Rp33.346.100,00. Terdapat selisih yang penjelasannya sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	74.554.634,08
	Belanja alat tulis kantor	33.346.100,00
2	Beban alat tulis kantor	33.868.816,32
	Saldo akhir	77.852.917,76
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>3.821.000,00</b>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan ATK ke persediaan kertas dan cover</i>	<i>(2.264.000,00)</i>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

	<i>Reklasifikasi dari persediaan bahan cetak ke persediaan ATK</i>	4.885.000,00
	<i>Reklasifikasi dari persediaan kertas dan cover ke persediaan ATK</i>	1.200.000,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

h. Beban Kertas dan cover

Jumlah Beban persediaan kertas dan cover Rp19.148.500,00 dan jumlah Belanja persediaan kertas dan cover sebesar Rp21.731.000,00. Terdapat selisih yang penjelasannya sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	11.601.100,00
	Belanja kertas dan cover	21.731.000,00
2	Beban kertas dan cover	19.148.500,00
	Saldo akhir	16.633.600,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>2.450.000,00</b>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan kertas dan cover ke persediaan ATK</i>	<i>(1.200.000,00)</i>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan ATK ke persediaan kertas dan cover</i>	2.264.000,00
	<i>Reklasifikasi dari persediaan cetak ke persediaan kertas dan cover</i>	1.386.000,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

i. Beban Bahan Cetak

Jumlah Beban persediaan bahan cetak Rp250.065.594,00 dan jumlah Belanja persediaan bahan cetak sebesar Rp256.716.594,00. Terdapat selisih yang penjelasannya sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja bahan cetak	256.716.594,00
2	Beban bahan cetak	250.065.594,00
	Saldo akhir	1.009.000,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(5.642.000,00)</b>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan cetak ke persediaan kertas dan cover</i>	<i>(1.386.000,00)</i>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan cetak ke persediaan ATK</i>	<i>(4.885.000,00)</i>
	<i>RK persediaan ke Dinas Kesehatan</i>	<i>(380.000,00)</i>
	<i>RK persediaan dari DPU</i>	694.000,00
	<i>RK persediaan dari Dinas Kesehatan</i>	315.000,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

j. Beban Benda Pos



Jumlah beban persediaan benda pos Rp4.940.000,00 dan jumlah belanja persediaan benda pos Rp4.370.000,00. Penjelasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	1.520.000,00
	Belanja benda pos	4.370.000,00
2	Beban benda pos	4.940.000,00
	Saldo akhir	950.000,00
	<b>Selisih :</b>	<b>0,00</b>

k. Beban Bahan Komputer

Jumlah beban persediaan bahan komputer Rp2.797.400,00 dan jumlah belanja persediaan bahan komputer Rp2.889.100,00. Penjelasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	3.340.400,00
	Belanja bahan komputer	2.889.100,00
2	Beban bahan komputer	2.797.400,00
	Saldo akhir	3.432.100,00
	<b>Selisih :</b>	<b>0,00</b>

l. Beban Perabot Kantor

Jumlah beban persediaan perabot kantor 8.917.350,00 dan jumlah belanja persediaan perabot kantor Rp3.017.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp104.71.600,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	6.398.850,00
	Belanja perabot kantor	3.017.000,00
2	Beban perabot kantor	8.917.350,00
	Saldo akhir	10.970.100,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>10.471.600,00</b>
	<i>Reklasifikasi dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ke persediaan perabot kantor</i>	<i>1.007.600,00</i>
	<i>Reklasifikasi dari persediaan belanja bahan-bahan lainnya ke persediaan perabot kantor</i>	<i>9.464.000,00</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

m. Beban Alat listrik

Jumlah beban persediaan alat listrik Rp11.619.500,00 dan jumlah belanja alat listrik Rp10.493.900,00. Tidak terdapat selisih, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	11.846.400,00
	Belanja alat listrik	10.493.900,00



2	Beban alat listrik	11.619.500,00
	Saldo akhir	10.720.800,00
	<b>Selisih :</b>	<b>0,00</b>

## n. Beban Perlengkapan Dinas

Jumlah beban persediaan perlengkapan dinas Rp140.539.500,00 dan tidak ada belanja pada persediaan perlengkapan dinas. Terdapat selisih senilai Rp141.069.500,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja perlengkapan dinas	0,00
2	Beban perlengkapan dinas	140.539.500,00
	Saldo akhir	530.000,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(141.069.500,00)</b>
	<i>Reklasifikasi dari belanja pakaian olah raga dan pakaian batik tradisional ke persediaan perlengkapan dinas</i>	<i>140.539.500,00</i>
	<i>RK dari Sekretariat Daerah (gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota)</i>	<i>530.000,00</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## o. Beban souvenir/ cinderamata

Jumlah beban persediaan souvenir/cinderamata sama dengan jumlah belanja senilai Rp24.962.000,00. Tidak terdapat selisih.

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja souvenir/cinderamata	24.962.000,00
2	Beban souvenir/cinderamata	24.962.000,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Selisih :</b>	<b>0,00</b>

## p. Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

Jumlah beban persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp29.165.600,00 dan jumlah belanja senilai Rp29.966.800,00. Terdapat selisih senilai Rp1.007.200,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	260.000,00
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	29.966.800,00
2	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	29.165.600,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(1.007.200,00)</b>



	<i>Reklasifikasi dari persediaan perabot kantor ke persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya</i>	1.007.200,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## q. Beban obat

Jumlah beban persediaan obat sebesar Rp131.091.609,00 dan jumlah belanja Rp0,00 (nihil). Terdapat selisih sebesar Rp280.833.486,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	318.675.517,90
	Belanja obat	0,00
2	Beban obat	131.091.609,00
	Saldo akhir	468.417.394,90
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>280.833.486,00</b>
	<i>Droping dari BKKBN</i>	<i>403.591.633,00</i>
	<i>RK ke Dinas Kesehatan</i>	<i>(122.758.147,00)</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## r. Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain

Jumlah beban persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain senilai Rp563.71.832,00 dan jumlah belanja persediaan ini sebesar Rp459.671.836,00. Terdapat selisih Rp103.999.996,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan	459.671.836,00
2	Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan ..	563.671.832,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>103.999.996,00</b>
	<i>Reklasifikasi dari beban belanja TKDD</i>	<i>(103.999.996,00)</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## s. Beban Natura dan Pakan

Jumlah beban persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp717.159.300,00 dan nilai belanja persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp16.659.300,00. Terdapat selisih sebesar Rp700.500.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	
1	Saldo awal	0,00
	Belanja Persediaan Natura dan pakan	16.659.300,00
2	Beban Persediaan Natura dan pakan	717.159.300,00
	Saldo akhir	0,00
	<b>Penjelasan Selisih :</b>	<b>(700.500.000,00)</b>
	<i>Reklasifikasi dari belanja makanan dan minuman rapat</i>	<i>694.756.000,00</i>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

	<i>Reklasifikasi dari belanja makanan dan minuman Jamuan tamu</i>	5.744.000,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

**V.2.1.4.3 Beban Jasa**

**Rp2.036.828.060,32**

Beban jasa terdiri dari :

Beban Jasa		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Honorarium Narsum, atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	243.150.000,00	318.370.000,00
2	Honorarium Tim Pelaks Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaks Keg	0,00	49.000.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00	0,00
4	Honorarium Penyelenggara Keg.Pendidikan & Pelatihan	32.900.000,00	23.200.000,00
5	Jasa Tenaga Kesehatan	93.438.181,00	108.677.523,0
6	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana & Sarana Umum	0,00	3.470.000,00
7	Jasa Laboratorium		0,00
8	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.110.000,00	30.220.000,00
9	Jasa Tenaga Administrasi	316.162.608,00	394.646.860,00
10	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	46.000.000,00	22.890.000,00
11	Jasa Tenaga Ahli	6.400.000,00	0,00
12	Jasa Tenaga Kebersihan	60.299.288,00	56.619.024,00
13	Jasa Tenaga Keamanan	185.129.972,00	176.251.220,00
14	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.900.000,00	
15	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.800.000,00	30.400.000,00
16	Jasa Tata Rias	600.000,00	5.100.000,00
17	Jasa tenaga Informasi dan teknologi	8.400.000,00	8.400.000,00
18	Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	0,00
19	Jasa Kontribusi Asosiasi	410.000,00	0,00
20	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.580.000,00	50.496.000,00
21	Tagihan telepon	1.236.852,00	1.236.852,00
22	Tagihan air	10.990.900,00	12.821.350,00
23	Tagihan listrik	53.530.273,00	45.304.359,00
24	Langganan Jurnal/ surat kabar/majalah	3.300.000,00	2.691.000,00
25	Kawat/Faksimili/Internet/ TV berlangganan	20.981.350,00	18.411.050,00
26	Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan	27.740.500,00	19.359.500,00
27	Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan	500.000,00	2.000.000,00
28	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	20.160.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beban Jasa		2025 (Rp)	2024 (Rp)
29	Beban iuran jaminan/asuransi	60.150.786,32	46.443.093,29
30	Beban sewa gedung dan bangunan	51.025.000,00	17.575.000,00
31	Beban sewa peralatan dan mesin	57.286.000,00	109.186.500,00
32	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	45.285.000,00	27.880.000,00
33	Beban Jasa Konsultansi Non konstruksi	74.736.350,00	78.088.500,00
34	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	501.225.000,00	410.050.000,00
<b>Jumlah Beban Jasa</b>		<b>2.036.828.060,32</b>	<b>2.068.787.831,29</b>

**Analisis Vertikal Horizontal LRA – Laporan Operasional**

Belanja jasa tahun anggaran 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.048.301.444,00 sedangkan beban jasa pada Laporan Operasional Rp2.036.828.060,32, sehingga terdapat selisih (Rp11.473.383,68) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	BEBAN (LO)	BELANJA (LRA)	SELISIH
Honorarium Narsum, atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	243.150.000,00	243.150.000,00	-
Honorarium Tim Pelaks Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaks Keg	0	-	-
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00	14.400.000,00	-
Honorarium Penyelenggara Keg.Pendidikan & Pelatihan	32.900.000,00	32.900.000,00	-
Jasa Tenaga Kesehatan	93.438.181,00	93.438.181,00	-
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana & Sarana Umum	0	-	-
Jasa Laboratorium	-	-	-
Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.110.000,00	13.110.000,00	-
Jasa Tenaga Administrasi	316.162.608,00	313.629.025,00	2.533.583,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	46.000.000,00	46.000.000,00	-
Jasa Tenaga Ahli	6.400.000,00	6.400.000,00	-
Jasa Tenaga Kebersihan	60.299.288,00	60.299.288,00	-
Jasa Tenaga Keamanan	185.129.972,00	185.129.972,00	-
Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.900.000,00	5.900.000,00	-
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.800.000,00	28.800.000,00	-
Jasa Tata Rias	600.000,00	600.000,00	-
Jasa tenaga Informasi dan teknologi	8.400.000,00	8.400.000,00	-
Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Jasa Kontribusi Asosiasi	410.000,00	410.000,00	-
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	50.580.000,00	50.580.000,00	-
Tagihan telepon	1.236.852,00	1.236.852,00	-
Tagihan air	10.990.900,00	9.975.700,00	1.015.200,00
Tagihan listrik	53.530.273,00	55.013.633,00	(1.483.360,00)
Langganan Jurnal/ surat kabar/majalah	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan	20.981.350,00	19.367.400,00	1.613.950,00
Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan	27.740.500,00	27.740.500,00	-
Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan	500.000,00	500.000,00	-
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	20.160.000,00	20.160.000,00	-



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

Beban iuran jaminan/asuransi	60.150.786,32	75.303.543,00	(15.152.756,68)
Beban sewa gedung dan bangunan	51.025.000,00	51.025.000,00	-
Beban sewa peralatan dan mesin	57.286.000,00	57.286.000,00	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	45.285.000,00	45.285.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Non konstruksi	74.736.350,00	74.736.350,00	-
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	501.225.000,00	501.225.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2.036.828.060,32</b>	<b>2.048.301.444,00</b>	<b>(11,473.383,68)</b>

Penjelasan dari selisih tersebut adalah sebagai berikut :

a. Beban Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah beban jasa tenaga administrasi sebesar Rp316.162.608,00 dan belanja jasa tenaga administrasi Rp313.629.025,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.533.583,00.

NO	URAIAN	
1	Belanja jasa tenaga administrasi	313.629.025,00
2	Beban Jasa tenaga administrasi	316.162.608,00
	<b>Penjelasan Selisih</b>	<b>2.533.583,00</b>
	<i>Beban Jasa Tenaga Administrasi bulan Desember 2025 yang belum dibayar (Jurnal Utang Belanja Tahun 2025)</i>	2.533.583,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

b. Beban Jasa Tagihan air

Jumlah beban tagihan air sebesar Rp10.990.900,00 dan belanja tagihan air Rp9.975.700,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.015.200,00

NO	URAIAN	
1	Belanja Tagihan Air	9.975.700,00
2	Beban Tagihan Air	10.990.900,00
	<b>Penjelasan Selisih</b>	<b>1.015.200,00</b>
	<i>Beban Tagihan Air bulan Desember 2025 yang belum dibayar (Jurnal Utang Belanja Tahun 2025)</i>	1.487.700,00
	<i>Beban Tagihan Air Bulan Desember 2024 yang dibayar pada bulan Januari 2025 (Pembalik Utang Belanja Tahun 2024)</i>	472.500,00
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

c. Beban Jasa Tagihan Listrik

Jumlah beban tagihan listrik sebesar Rp53.530.273,00 dan belanja tagihan listrik Rp55.013.633,00, sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.483.360,00).

NO	URAIAN	
1	Belanja Tagihan Listrik	55.013.633,00
2	Beban Tagihan Listrik	53.530.273,00
	<b>Penjelasan Selisih</b>	<b>(1.483.360,00)</b>
	<i>Beban Tagihan listrik bulan Desember 2025 yang belum dibayar (Jurnal Utang Belanja Tahun 2025)</i>	3.896.239,00
	<i>Beban Tagihan Listrik Bulan Desember 2024 yang dibayar pada bulan Januari 2025 (Pembalik Utang Belanja Tahun 2024)</i>	5.379.599,00



	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	-------------

## d. Beban Jasa Internet

Jumlah beban jasa Internet sebesar Rp20.981.350,00 dan belanja jasa internet Rp19.367.400,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.613.950,00.

NO	URAIAN	
1	Belanja jasa internet	19.367.400,00
2	Beban Jasa Internet	20.981.350,00
	<b>Penjelasan Selisih</b>	<b>1.613.950,00</b>
	<i>Beban Jasa internet bulan Desember 2025 untuk Balai Penyuluh KB yang belum dibayar (Jurnal Utang Belanja Tahun 2025)</i>	<i>1.613.950,00</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

## e. Beban Asuransi Barang Milik Daerah

Jumlah beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp42.897.154,00 dan belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp58.049.911,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp(15.152.756,68).

NO	URAIAN	
1	Belanja Asuransi BMD	58.049.911,00
2	Beban Asuransi BMD	42.897.154,00
	<b>Penjelasan Selisih</b>	<b>(15.152.756,68)</b>
	<i>Beban dibayar di muka tahun 2025</i>	<i>36.671.565,89</i>
	<i>Beban dibayar di muka tahun 2024</i>	<i>21.518.809,21</i>
	<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

**V.2.1.4.4 Beban Pemeliharaan****Rp99.587.220,00**

Beban pemeliharaan terdiri dari :

Beban Pemeliharaan		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pemeliharaan Peralatan & Mesin	99.587.220,00	61.115.434,00
	<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>99.587.220,00</b>	<b>61.115.434,00</b>

**Analisis Vertikal Horizontal LRA – Laporan Operasional**

Belanja pemeliharaan tahun anggaran 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp99.587.220,00 memiliki nilai yang sama dengan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional Rp99.587.220,00.

**V.2.1.4.5 Beban Perjalanan Dinas****Rp1.509.886.960,00**

Beban perjalanan dinas terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beban Perjalanan Dinas		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	175.753.080,00	307.434.119,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.258.063.880,00	1.376.950.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	76.070.000,00	198.287.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	34.850.000,00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>1.509.886.960,00</b>	<b>1.917.521.119,00</b>

**Analisis Vertikal Horizontal LRA – Laporan Operasional**

Beban perjalanan dinas tahun 2025 senilai Rp1.509.886.960,00 memiliki nilai yang sama dengan belanja perjalanan dinas Rp1.509.886.960,00.

**V.2.1.4.6 Beban Bunga Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban bunga (*nihil*)

**V.2.1.4.7 Beban Subsidi Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban subsidi (*nihil*)

**V.2.1.4.8 Beban Hibah Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban hibah (*nihil*)

**V.2.1.4.9 Beban Bantuan Sosial Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban bantuan sosial (*nihil*)

**V.2.1.4.10 Beban Penyusutan Rp413.958.065,94**

Beban Penyusutan sebesar Rp413.958.065,94 terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, serta beban amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan		2025 (Rp)	2024 (Rp)
A	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	190.204.214,28	285.602.357,24
2	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00	969.091,20
3	Beban Penyusutan Alat Kantor	9.614.200,00	16.291.460,00
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	33.810.504,82	47.311.704,82
6	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	648.000,00	1.803.000,00
7	Beban Penyusutan Alat Studio	8.764.000,00	8.434.000,00
8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	2.525.000,00	2.525.000,00



## PEMERINTAH KOTA SALATIGA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beban Penyusutan		2025 (Rp)	2024 (Rp)
10	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.337.500,00	2.140.000,00
11	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	20.676.200,00	23.032.400,00
12	Beban Penyusutan Komputer Unit	28.186.500,00	35.957.500,00
13	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	8.271.250,13	7.524.000,01
	<b>Jumlah A</b>	<b>304.037.369,23</b>	<b>431.590.513,27</b>
B	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.419.714,81	109.895.521,79
2	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.211.708,80	5.211.708,80
	<b>Jumlah B</b>	<b>108.631.423,61</b>	<b>115.107.230,59</b>
C	BEBAN PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		
1	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.289.273,10	1.289.273,10
	<b>Jumlah C</b>	<b>1.289.273,10</b>	<b>1.289.273,10</b>
D	BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD		
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	17.075.500,00
	<b>Jumlah D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.500,00</b>
	<b>Jumlah Beban Penyusutan A + B + C + D</b>	<b>413.958.065,94</b>	<b>565.062.516,96</b>

**V.2.1.4.11 Beban Penyisihan Piutang****Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban penyisihan piutang (*nihil*).

**V.2.1.4.12 Beban Transfer****Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban transfer (*nihil*).

**V.2.1.4.13 Beban Lain Lain****Rp0,00**

Pada tahun 2025, DP3APPKB tidak memiliki beban lain-lain (*nihil*).

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp10.560.885.511,58) yang merupakan selisih kurang antara pendapatan dikurangi beban.

**V.2.2 Kegiatan Non Operasional****Rp0,00**

Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional tahun 2025 sebesar Rp0,00 (*nihil*).

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya (+)		
- koreksi akumulasi penyusutan tahun 2024 atas peralatan dan mesin, koreksi akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan, serta koreksi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	31.091.617,11
- Koreksi Implementasi E-BMD Selisih Kurang atas Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor dan Penggabungan - Bangunan Gedung Garasi/Pool ke Bangunan Gedung Kantor (AP tidak Ikut Pindah Ke Gedung Kantor)	0,00	20.899.201,84
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya (-)		



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
 Keluarga Berencana**

- koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan asset gedung dan bangunan	0,00	(30.693.708,35)
<b>Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>23.338.235,61</b>

**V.2.3 Pos Luar Biasa** **Rp0,00**

Pada DP3APPKB Kota Salatiga tahun 2025 tidak ada Pos-pos luar biasa (*nihil*).

**V.2.4 Surplus/Defisit-LO** **(Rp10.560.885.506,45)**

Surplus/Defisit-LO pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar (Rp10.560.885.506,45)

URAIAN	
Pendapatan hibah	414.091.633,00
Beban tahun berjalan	(10.974.977.139,45)
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(10.560.885.506,45)</b>

**4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2025, dapat dilihat dari uraian berikut ini :

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	6.481.870.073,97	6.265.730.370,44
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	(10.560.885.506,45)	(11.455.196.574,47)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
	LAIN-LAIN	(354.881.540,79)	(119.511.747,00)
4	AKUN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.849.919.252,00	11.790.848.025,00
5	EKUITAS AKHIR	6.416.022.278,73	6.481.870.073,97

**V.3.1 Ekuitas Awal** **Rp6.481.870.073,97**

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh DP3APPKB Kota Salatiga pada 1 Januari 2025 sebesar Rp6.481.870.073,97.

**V.3.2 Surplus / Defisit LO** **Rp(10.560.885.506,45)**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan dan beban belanja yang menjadi tanggungan dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
<b>Pendapatan</b>	<b>414.091.633,00</b>	<b>217.477.300,00</b>
<b>Beban :</b>	<b>10.974.977.144,58</b>	<b>11.696.012.110,08</b>
Beban Pegawai	4.844.814.323,00	4.724.633.491,00
Beban Persediaan	2.069.902.515,32	2.358.891.717,83
Beban Jasa	2.036.828.055,19	2.068.787.831,29
Beban Pemeliharaan	99.587.220,00	61.115.434,00
Beban Perjalanan Dinas	1.509.886.960,00	1.917.521.119,00



Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan dan amortisasi	413.958.065,94	565.062.516,96
<b>Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	-	<b>23.338.235,61</b>
<b>Defisit – LO</b>	<b>(10.560.885.506,45)</b>	<b>(11.455.196.574,47)</b>

### V.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan

**Mendasar (Rp354.881.540,79)**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada DP3APPKB Kota Salatiga tahun 2025 yang berasal dari Pos Lain-Lain sebesar (Rp354.881.540,79)

#### V.3.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada DP3APPKB Kota Salatiga tahun 2025 sebesar Rp0,00 (nihil)

#### V.3.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap pada DP3APPKB Kota Salatiga tahun 2025 sebesar Rp0,00 (nihil)

#### V.3.3.3 Lain-Lain

Pos Lain-lain pada DP3APPKB Kota Salatiga tahun 2025 sebesar Rp(354.881.540,79) yang terdiri atas RK:

<b>LAIN-LAIN :</b>	<b>(354.881.540,79)</b>
Bahan Cetak	(380.000,00)
Obat	(122.758.147,00)
Tanah Perkebunan	6.390.836,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(0,03)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.614.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	403.640,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	789.952,42
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	380.960,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	324.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	717.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	9.620.900,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	4.012.500,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.933.250,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	725.250,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(245.198.856,67)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(9.089.389,50)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(10.967.636,01)



**V.3.4 Akun Untuk Dikonsolidasikan** **Rp10.849.919.252**

Akun Untuk Dikonsolidasikan merupakan seluruh belanja baik belanja operasi maupun belanja modal yang dilaksanakan oleh DP3APPKB ditambah RK Persediaan antar OPD sebesar Rp10.849.919.252,00.

- a. RK PPKD sebesar Rp10.848.380.252,00 yang terdiri atas :

Belanja Operasi	10.486.076.287,00
Belanja Modal	362.303.965,00
<b>TOTAL RK PPKD</b>	<b>10.848.380.252,00</b>

- b. RK Persediaan sebesar Rp1.539.000,00

Dari Setda (gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota)	530.000,00
Dari Dinas Kesehatan (Roll Banner)	315.000,00
Dari DPU (Buku Perwali RDTR dan Lampiran Album Peta A3 RDTR)	694.000,00
<b>Total RK Persediaan</b>	<b>1.539.000,00</b>

**V.3.5 Ekuitas Akhir** **Rp6.416.022.278,73**

Ekuitas Akhir adalah ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah RK PPKD dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Ekuitas akhir DP3APPKB Tahun 2025 adalah :

EKUITAS AWAL	6.481.870.073,97
DEFISIT LO	(10.560.885.506,45)
DAMPAK KUMULATIF MENDASAR	(354.881.540,79)
AKUN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.849.919.252,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>6.416.022.278,73</b>



## BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

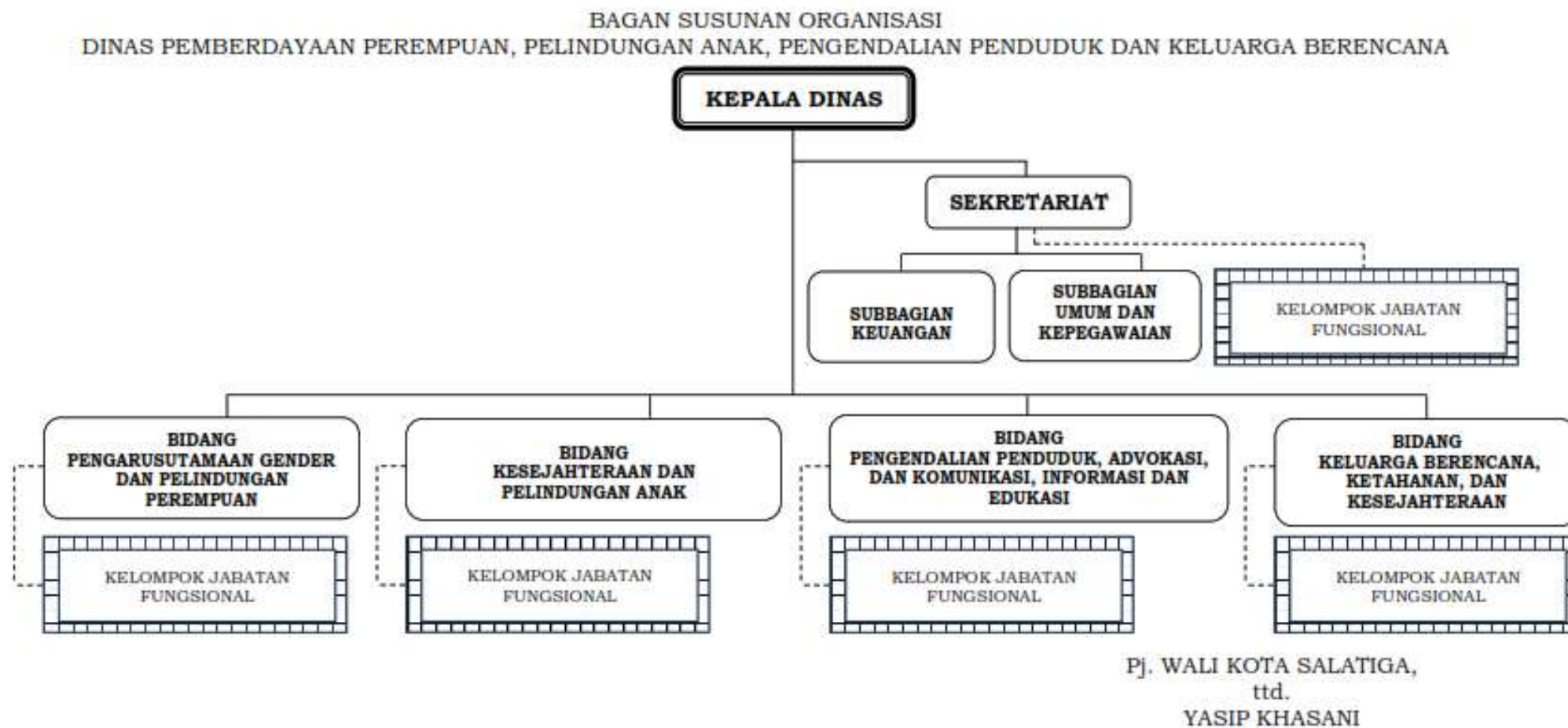
### 5.1. Organisasi dan Tata Kerja OPD

#### VI.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan, yang membawahi:
  1. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
  2. Sub Koordinator Pelindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak :
  1. Sub Koordinator Pelindungan Anak; dan
  2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yang membawahi :
  1. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan KB;
  2. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi :
  1. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana; dan
  2. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 6. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga



---

### **VI.3.2 Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perangkat daerah melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang organisasi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsinya, mempunyai uraian tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administrative Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pelayanan administrasi dinas;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional, yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan pelindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, dan sub urusan sistem data gender dan anak di lingkup pelebagaan pengarusutamaan gender serta pelindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.

- 1) Sub Koordinator Pelindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- 2) Sub Koordinator Pelebagaan Pengarusutamaan Gender.



---

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan.

d. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan anak

Bidang kesejahteraan dan pelindungan anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan pelindungan khusus anak di lingkup pelindungan anak serta pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan anak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator :

- 1) Sub Koordinator Pelindungan Anak; dan
- 2) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak.

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan pengendalian penduduk dan sub urusan keluarga berencana di lingkup advokasi, pergerakan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- 1) Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator :

- 1) Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
- 2) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan pengendalian penduduk dan sub urusan keluarga berencana di lingkup jaminan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator :

- 1) Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan
- 2) Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## **5.2. Rencana Strategis OPD**

### **VI.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan
  - a. Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata,
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB
  - a. Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat.
4. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,
  - b. Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)
5. Permasalahan terkait Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB
  - a. Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP).
6. Permasalahan terkait Kesetaraan dan Keadilan Gender
  - a. Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%.



- b. Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal life skill guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.
  - c. Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga.
7. Permasalahan terkait Pelindungan Perempuan Dan Anak
- a. masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan,
  - b. masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak.
8. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak
- a. Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya,
  - b. Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga.

### **VI.1.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026 dirumuskan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga;
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk;
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga;
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;



10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 nomor 4 (empat) dan nomor 8 (delapan). Guna mendukung Tujuan Tingkat Kota sebagaimana dijelaskan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka dirumuskan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DP3APPKB Kota Salatiga**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui : 1. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan kuantitas penduduk, 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, 3. Melaksanakan Sosialisasi Program KKBPK
2.	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : 1. Percepatan PPRG bagi OPD, 2. Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG, 3. Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG.  Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : 1. KIE penyelenggaraan SIGA, 2. Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak, 3. Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak, 4. Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait



### 5.3. Informasi Non Keuangan Lainnya

#### VI.2.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



---

## **II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - 2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota



**V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

**VII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - 1) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal



- 2) Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
  - 3) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - 2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

#### **VIII. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - 1) Pengendalian Program KKBPK
  - 2) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
  - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - 4) Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang
  - 5) Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP



- 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 6) Peningkatan Kesertaan KB Pria
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

#### **IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)
  - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - 2) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### VI.2.2 Prestasi atau Penghargaan

Pada tahun 2025, DP3APPKB Kota Salatiga memperoleh penghargaan/prestasi/nominasi sebagai berikut :

NO	NAMA PRESTASI/ PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN
1	Terbaik II Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK 2025)	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
2	Juara II Evaluasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
3	Juara I Apresiasi Rumah Dataku Tingkat Provinsi	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
4	Juara I Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Paripurnadan Penghargaan Pengelola Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Terbaik Tahun 2025	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
5	Juara III Apresiasi Duta Genre Jawa Tengah	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
6	Juara Favorit Apresiasi Duta Genre Jawa Tengah	Provinsi	Kemendukbangga / BKKBN
7	Juara Harapan I Lomba Jingle Gelari Pelangi 2025	Provinsi	PKK Provinsi Jawa Tengah
8	Juara Harapan I Lomba Vlog "Rabu Pon" bagi Kader dan TP PKK Se-Jawa Tengah Tahun 2025	Provinsi	PKK Provinsi Jawa Tengah



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salatiga, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA**

**SUPARLI, SKM., M.Kes**  
NIP. 19730616 199903 1 007

# **LAMPIRAN**